



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl. Perintis Kemerdekaan / BGR I No. 3 Jakarta Utara
Telp. 458 48014 – 458 48055 – 458 48011 – 453 4313 – 458 76685 Fax. 458 48014
Website <http://disppkukm.jakarta.go.id/>. E-mail: disppkukm@jakarta.go.id
J A K A R T A

Kode Pos 14240

Nomor : 7241-1.713.1
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian Usulan Draft
Peta Proses Bisnis Dinas
PPKUKM Provinsi DKI Jakarta

16 Februari 2021

Kepada
Kepala Biro Organisasi dan Reformasi
Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

Yth.

Menindaklanjuti surat Plt. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor 99/-1.713.1 tanggal 29 Januari 2021 perihal Tindak Lanjut Penyusunan Peta Proses Bisnis, dengan ini kami sampaikan Usulan Draft Peta Proses Bisnis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi DKI Jakarta

Drs. Andri Yansyah, M.H.
NIP. 197009271991011001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Plt. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta.
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta.
4. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta.



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR : 59 TAHUN

2021 TENTANG

PROSES BISNIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas,
efisiensi, dan produktifitas pelaksanaan tugas serta
hubungan kerja, diperlukan peta proses bisnis di
lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI
Jakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat
Keputusan Kepala Dinas tentang Peta Proses Bisnis
di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI
Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 139 Tahun 2019 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
4. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 148 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PROSES BISNIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA.

Pasal 1

Dalam keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi DKI Jakarta yang dimaksud :

1. Proses Bisnis adalah sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait untuk melaksanakan visi, misi dan rencana strategis daerah.
2. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bermilai tambah bagi pemangku kepentingan.

3. Supplier adalah unit organisasi yang menyediakan input untuk suatu proses.
4. Input adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses.
5. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi output.
6. Output adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses
7. Customer adalah unit organisasi yang menerima output dari suatu proses
8. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.
9. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
11. Kementerian / lembaga terkait adalah kementerian / lembaga yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 2

Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar pejabat Eselon III, Eselon IV dan staf untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan dan menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Pasal 3

- a. Peta Proses Bisnis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
- b. Pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- c. Hasil pemantauan dan evaluasi Peta Proses Bisnis dilaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dan ditembuskan kepada Biro ORB.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Januari 2021

Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DKI JAKARTA,



Drs. ANDRI YANSYAH, M.H
NIP. 197009271991011001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
3. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
5. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta;
8. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG PETA PROSES BISNIS DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA

**PETA PROSES BISNIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA**

1. SEJARAH PEMBENTUKAN

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dibentuk dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

2. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- d. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas mempunyai fungsi :

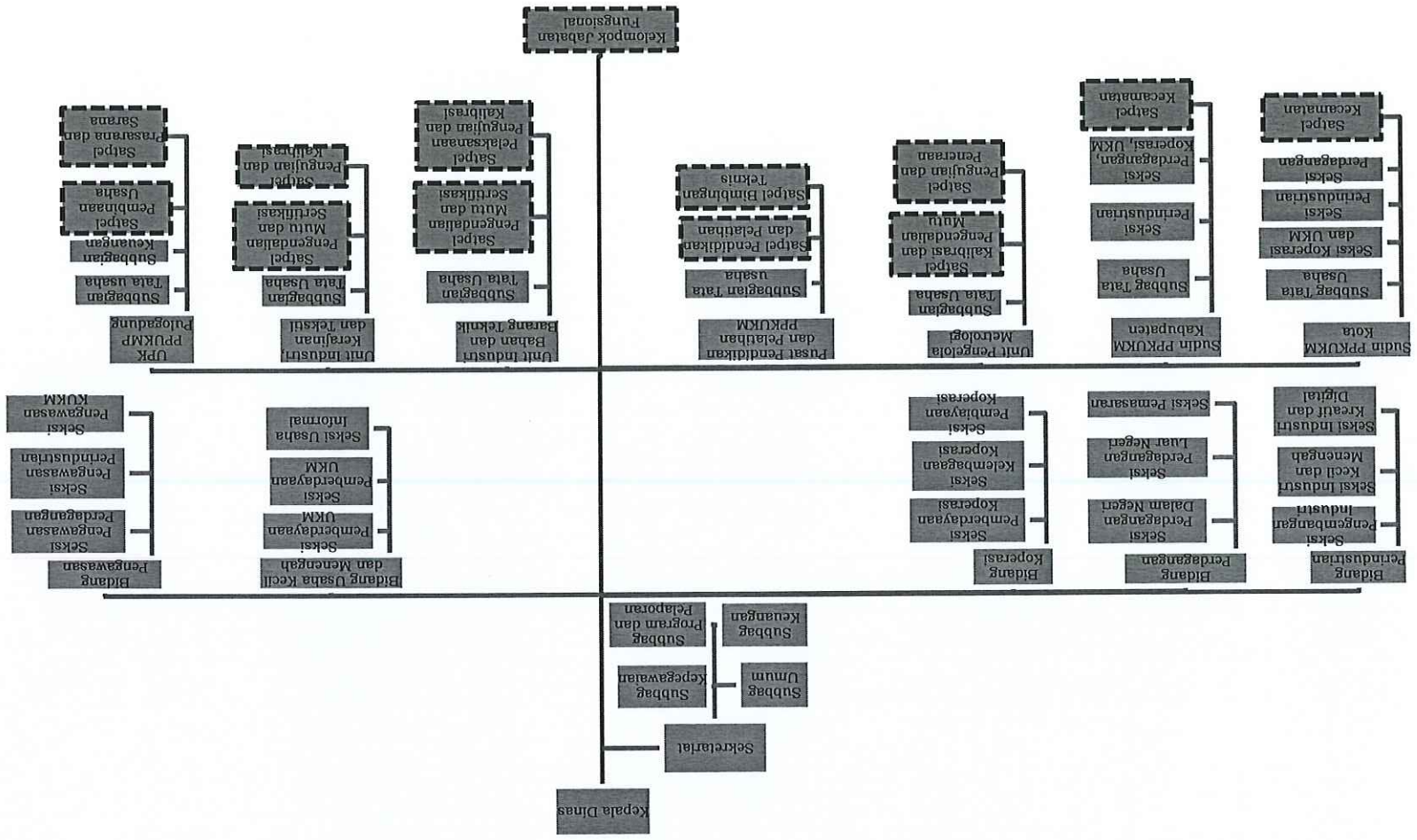
- a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- c. perumusan kebijakan, bisnis proses, standar dan prosedur Dinas;
- d. pelaksanaan kebijakan, bisnis proses, standar dan prosedur Dinas;
- e. pelaksanaan penataan, pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan, perdagangan dan kewirausahaan;
- f. pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- g. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat;
- h. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi dan sarana distribusi perdagangan;
- i. pelaksanaan penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- j. pelaksanaan pemantauan harga dan informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- k. pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;
- l. pelaksanaan promosi perdagangan dan pencitraan produk ekspor;
- m. pelaksanaan fasilitasi ekspor impor;
- n. pelaksanaan penerbitan surat keterangan asal;
- o. pelaksanaan perlindungan konsumen;
- p. pelaksanaan pengujian mutu barang;
- q. pelaksanaan pelatihan perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- r. pelaksanaan kemitrologian berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
- s. pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi;
- t. pengawasan dan pengendalian perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- u. pemberian rekomendasi perizinan/nonperizinan bidang perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- v. pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi Dinas;

- w. pelaksanaan pendampingan perlindungan hak kekayaan intelektual;
- x. pelaksanaan pendampingan sertifikasi produk-produk industri;
- y. pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- z. pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- aa. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- ab. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

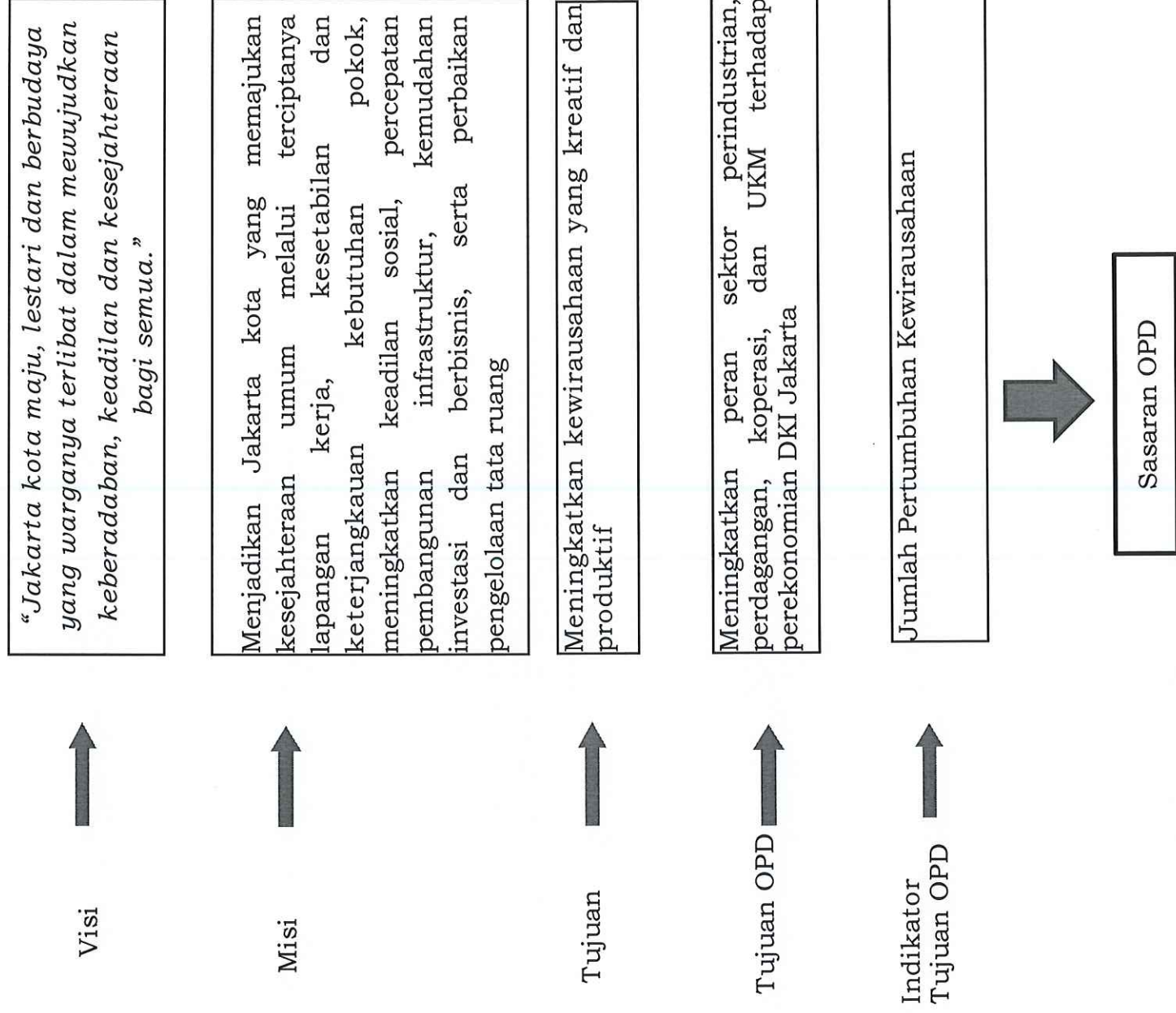
4. SUSUNAN ORGANISASI

- a. Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas :
 1. Sekretariat;
 2. Bidang Perindustrian;
 3. Bidang Perdagangan;
 4. Bidang Koperasi;
 5. Bidang Usaha Kecil dan Menengah
 6. Bidang Pengawasan
 7. Suku Dinas, terdiri atas :
 - a. Suku Dinas Kota
 - b. Suku Dinas Kabupaten
 8. Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas :
 - a. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - b. Unit Pengelola Metrologi
 - c. Unit Industri Bahan dan Barang Teknik
 - d. Unit Industri Kerajinan dan Tekstil
 - e. Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung
 9. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi



CASCADING SASARAN DAERAH, SASARAN PERANGKAT DAERAH,
INDIKATOR KINERJA, DAN PROGRAM PRIORITAS

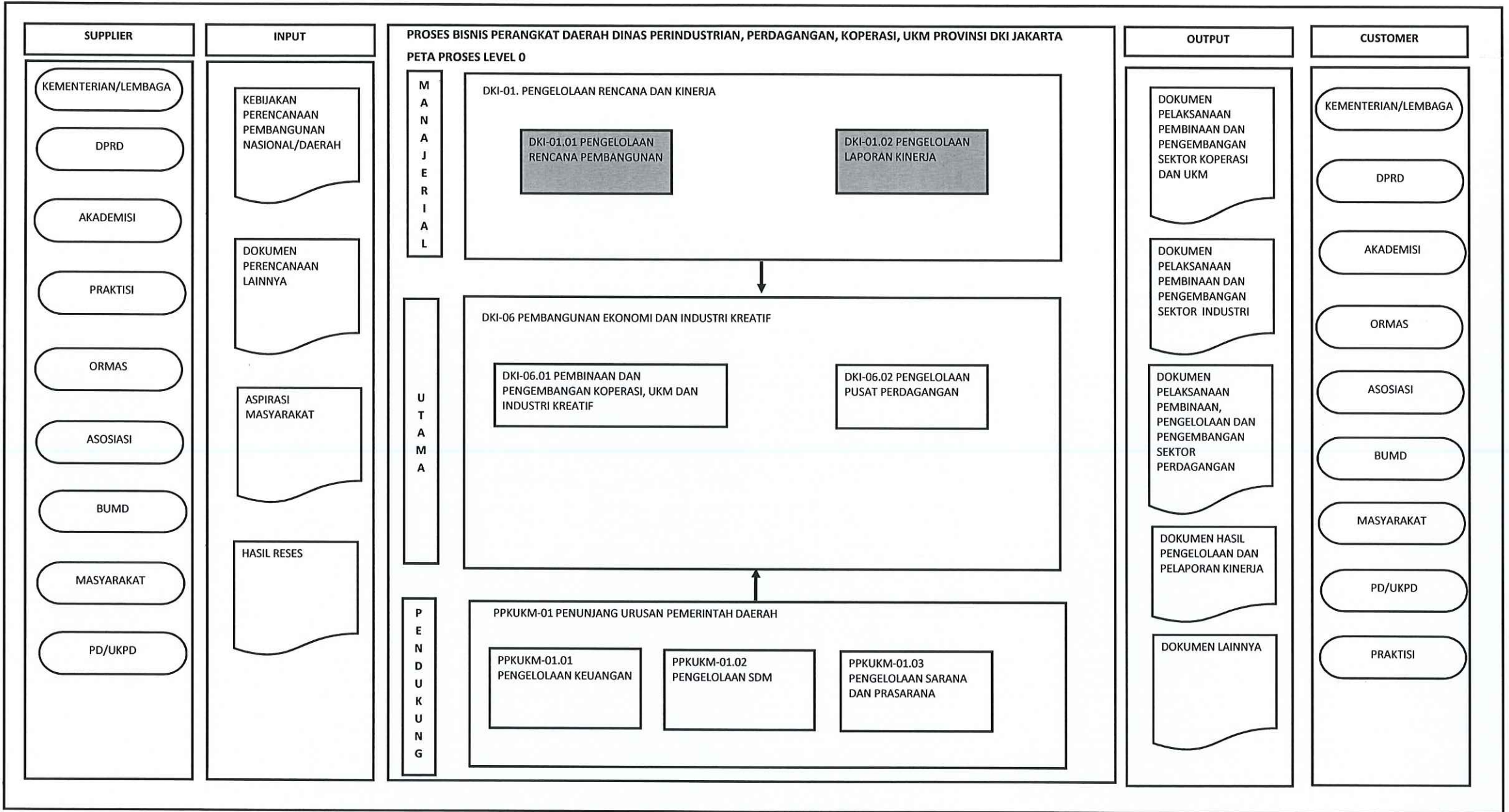


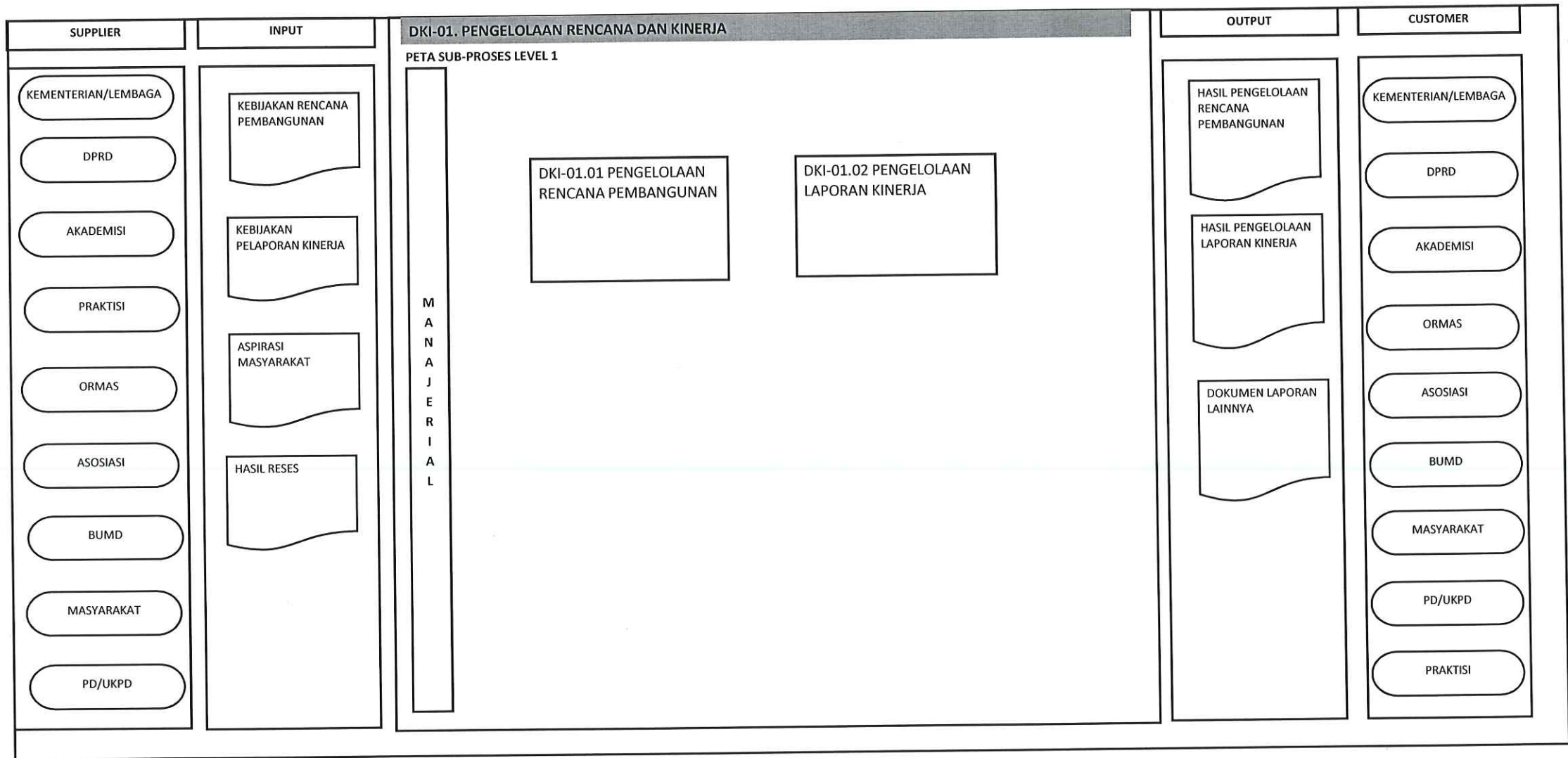
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
Meningkatkan peran sektor perdagangan terhadap perekonomian DKI Jakarta	kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, terhadap PDRB ADHB DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1 Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 2 Pengembangan Ekspor 3 Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 	<p>Jumlah SKA yang diterbitkan</p> <p>jumlah ekspor yang dilakukan UKM DKI Jakarta</p> <p>Jumlah pelaku usaha perdagangan yang terfasilitasi mengikuti promosi produk dalam negeri</p>
		<ol style="list-style-type: none"> 4 Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 	<ol style="list-style-type: none"> 1 persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti 2 Persentase Cakupan alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang 3 Jumlah pasar yang menjual produk ber SNI, produk makanan minuman dan menggunakan alat Kemetrologian yang diawasi 4 Jumlah pasar yang menggunakan alat Kemetrologian yang diawasi
		<ol style="list-style-type: none"> 5 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 	<p>Jumlah Koperasi yang bersertifikat Nomor Induk Koperasi</p>
		<ol style="list-style-type: none"> 6 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 	<p>Jumlah pengurus koperasi yang keanggotaan di DKI Jakarta yang diberikan pendidikan dan pelatihan perkoperasian</p>
		<ol style="list-style-type: none"> 7 Pengembangan UMKM 	<p>Jumlah UMKM peserta kegiatan pendidikan dan pelatihan serta Bimbingan teknis</p>

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
Meningkatnya kewirausahaan yang berdaya saing	Jumlah omset yang dihasilkan oleh pelaku wirausaha di wilayah DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 	<p>Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</p> <p>Jumlah pasar yang menjual produk ber SNI, produk makanan minuman yang memenuhi ketentuan</p>
Meningkatkan peran sektor perindustrian terhadap perekonomian DKI Jakarta	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB ADHB DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> Perencanaan dan Pembangunan Industri 	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah wirausaha industri baru Persentase pertumbuhan jumlah Industri Kreatif Persentase jumlah IKM yang berkualitas Persentase produk IKM bebas bahan berbahaya
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota 	<p>indeks kepuasan pelayanan kantor</p> <p>indeks kepuasan pelayanan kantor</p> <p>indeks kepuasan pelayanan kantor</p>



PETA PROSES BISNIS DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA

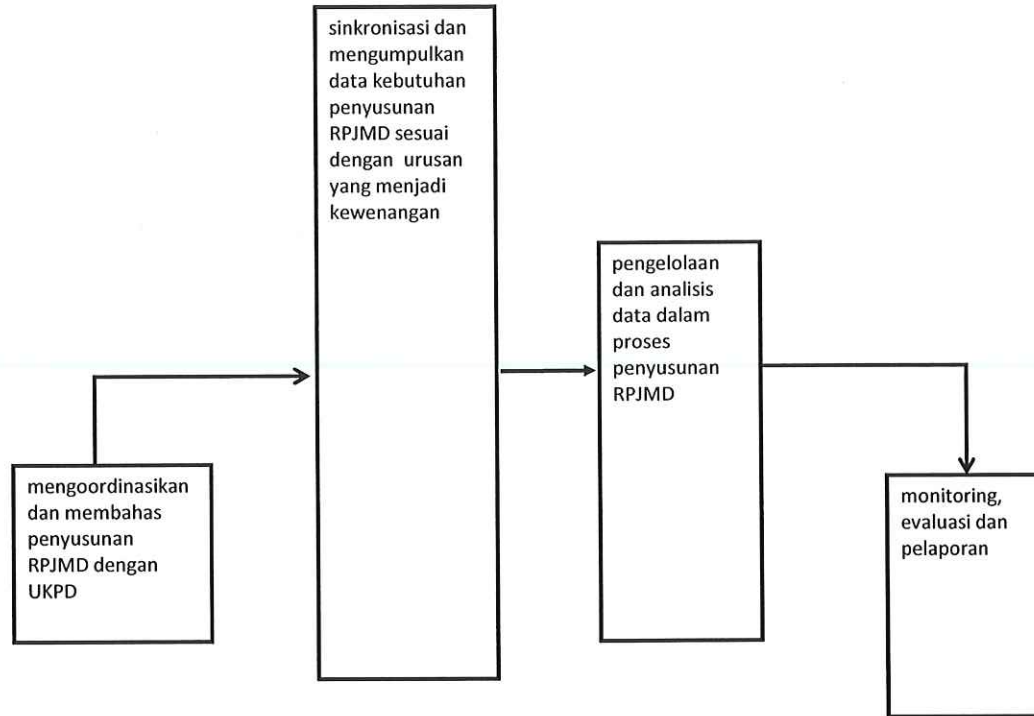




DKI-01.01 CFM.1 PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAN MENENGAH DAERAH

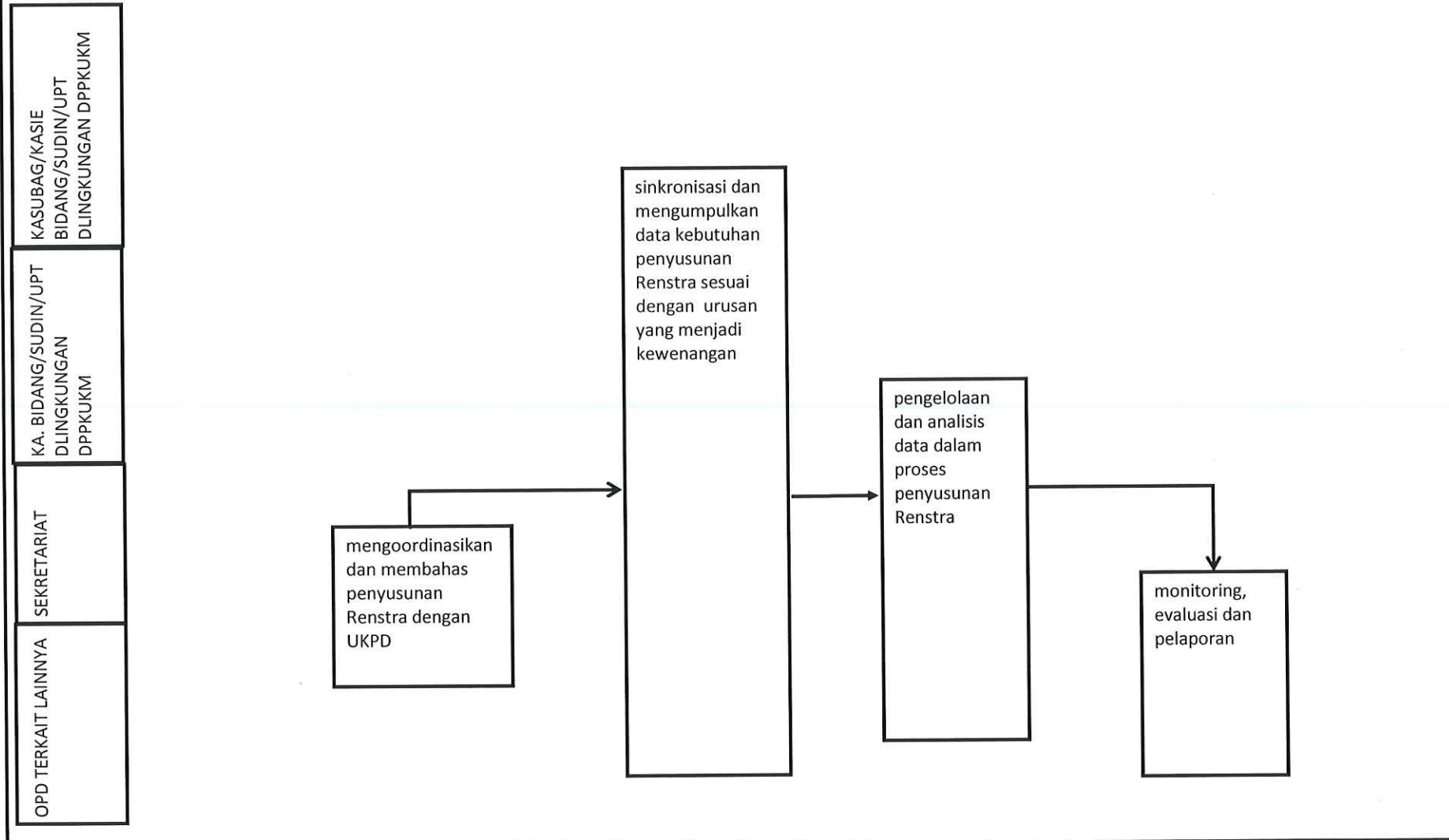
PETA LINTAS FUNGSI (CROSS-FUNCTIONAL MAP/CFM)

KASUBAG/KASIE BIDANG/SUDIN/UPT DLINGKUNGAN DPPKUKM
KA. BIDANG/SUDIN/UPT DLINGKUNGAN DPPKUKM
SEKRETARIAT
OPD TERKAIT LAINNYA



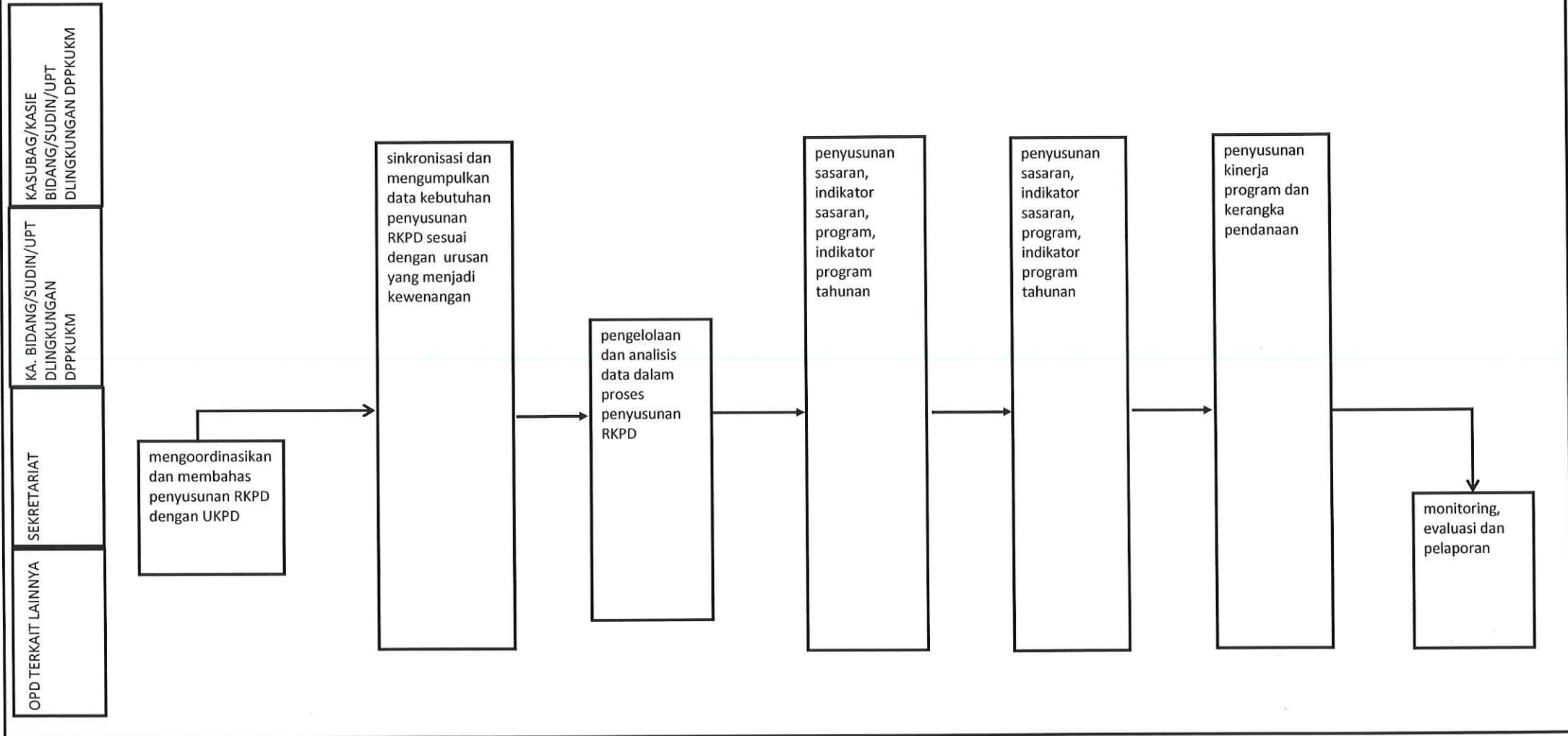
DKI-01.01 CFM.2 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

PETA LINTAS FUNGSI (CROSS-FUNCTIONAL MAP/CFM)



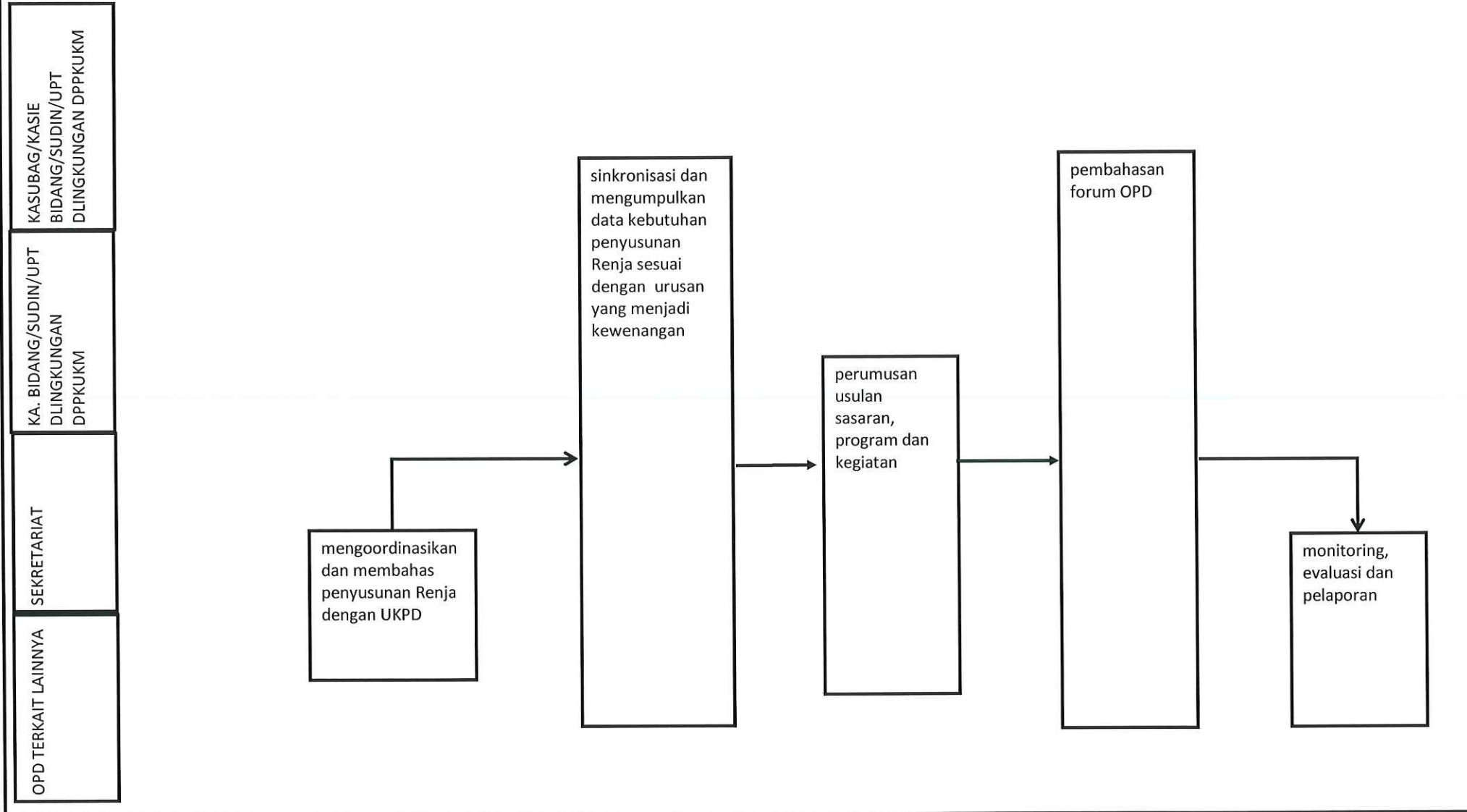
DKI-01.01 CFM.3 PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RKPD)

PETA LINTAS FUNGSI (CROSS-FUNCTIONAL MAP/CFM)



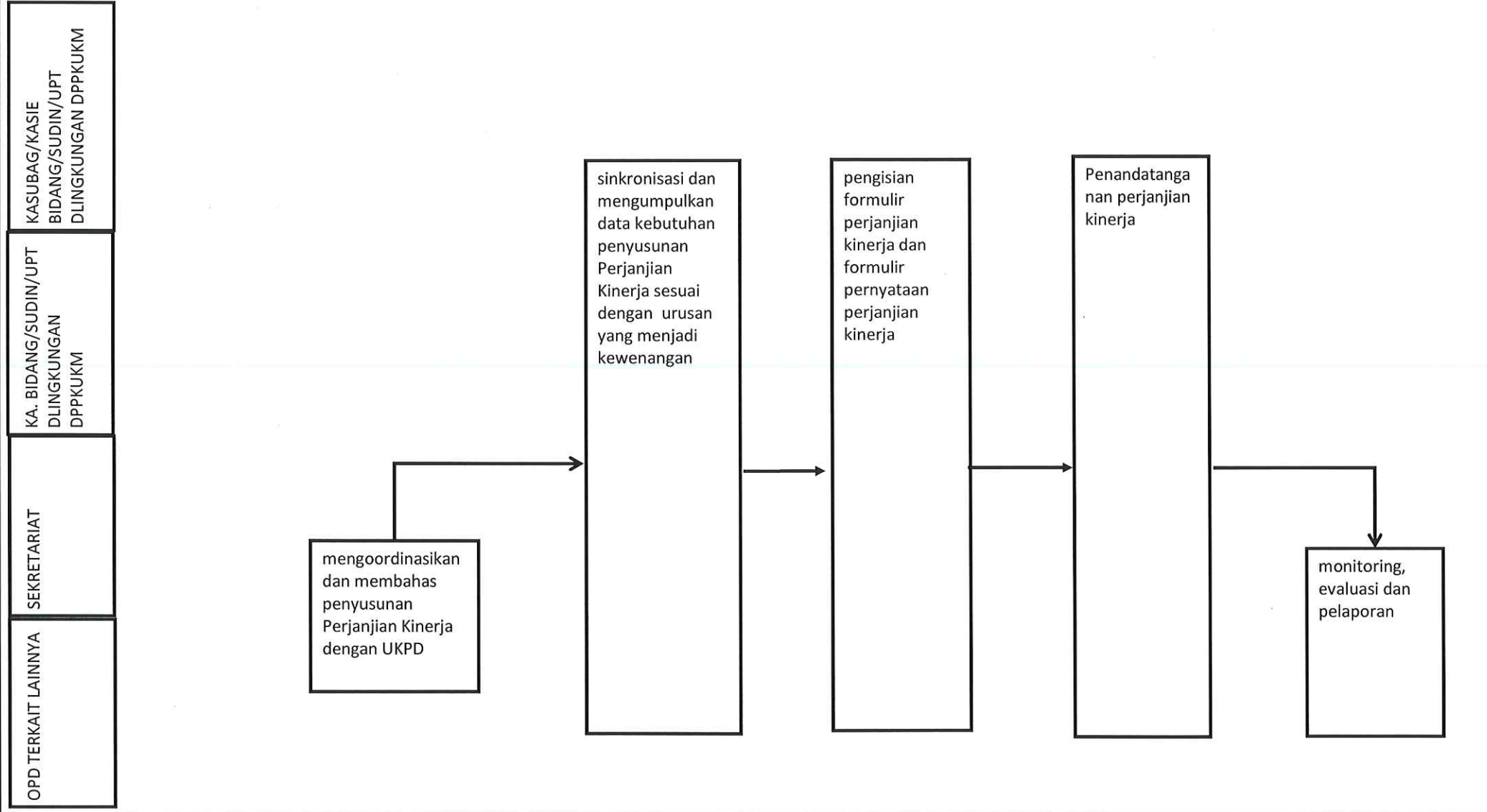
DKI-01.01 CFM.4 PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)

PETA LINTAS FUNGSI (CROSS-FUNCTIONAL MAP/CFM)



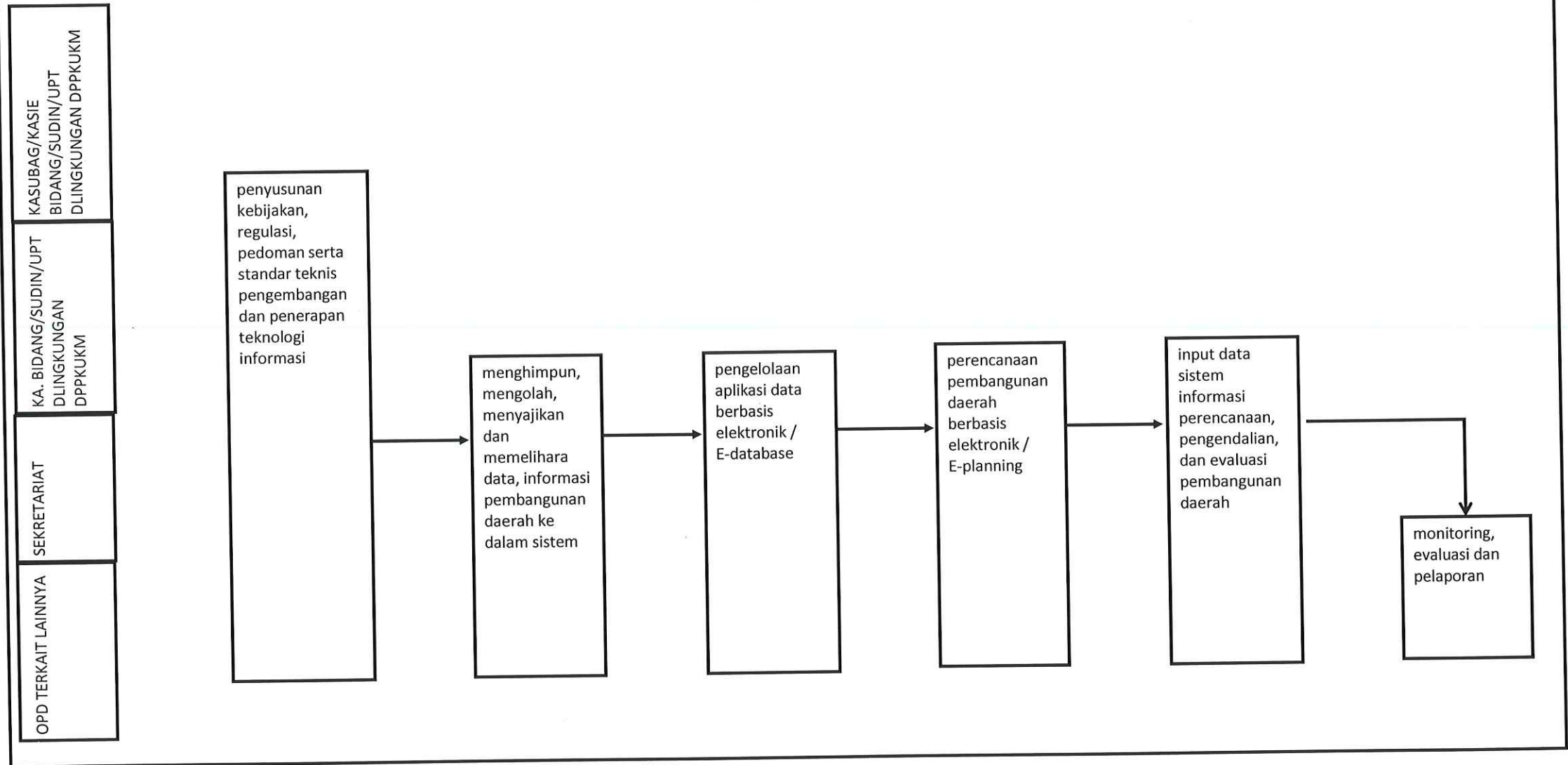
DKI-01.01 CFM.5 PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

PETA LINTAS FUNGSI (CROSS-FUNCTIONAL MAP/CFM)



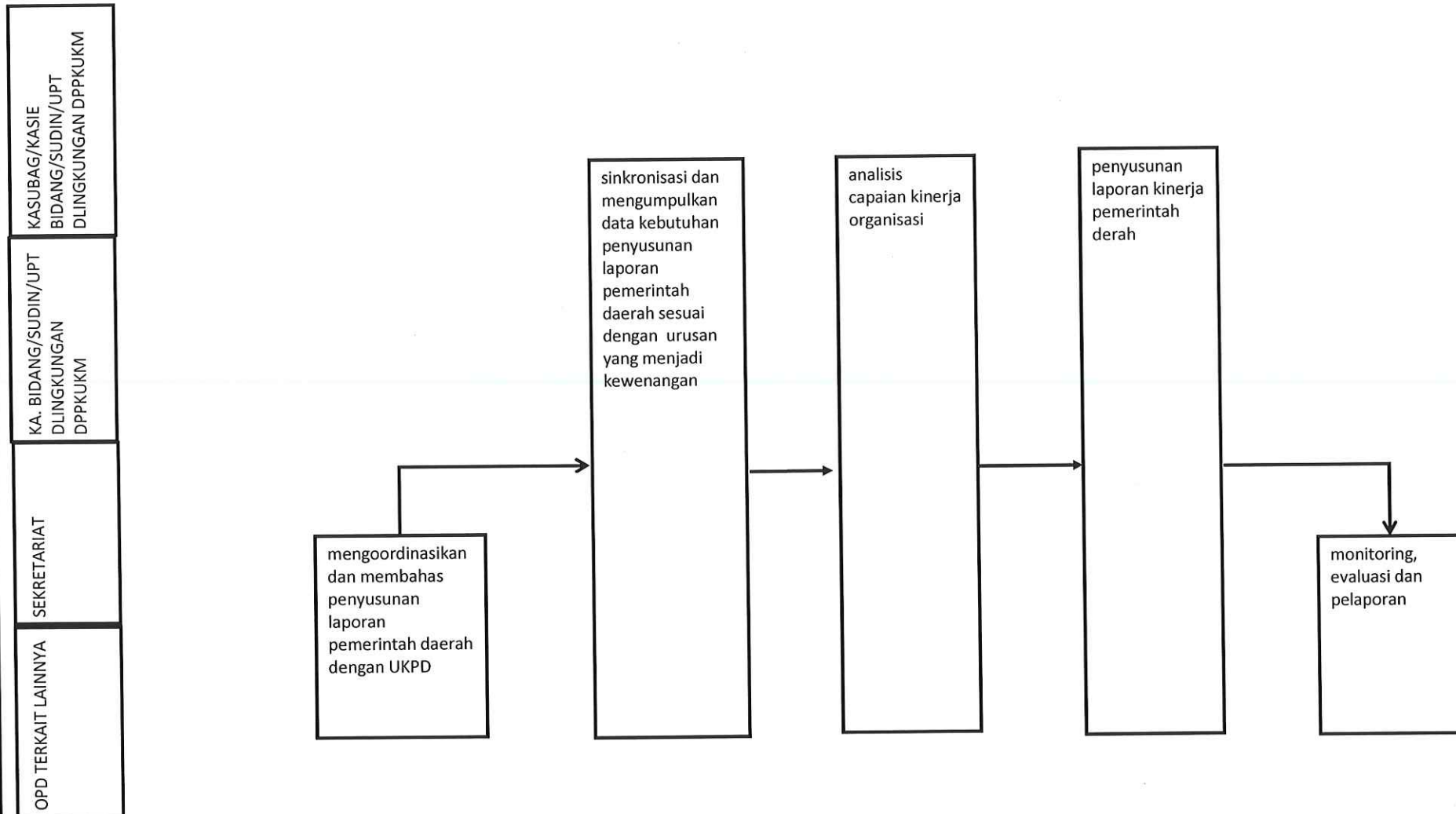
DKI-01.01 CFM.6 PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PETA LINTAS FUNGSI (CROSS-FUNCTIONAL MAP/CFM)



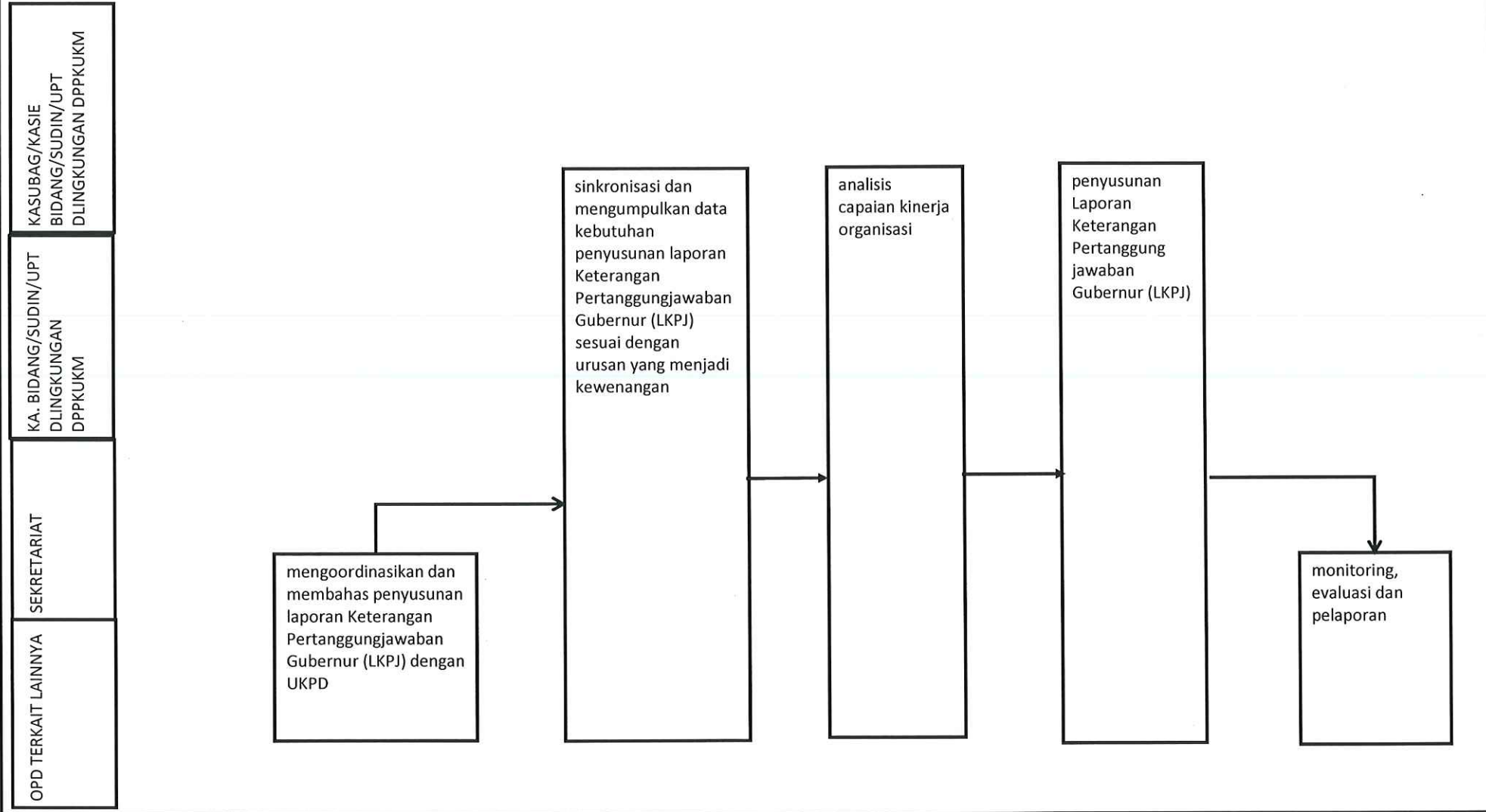
DKI-01.02 CFM.1 PENYUSUNAN LAPORAN PEMERINTAH DAERAH

PETA LINTAS FUNGSI (CROSS-FUNCTIONAL MAP/CFM)



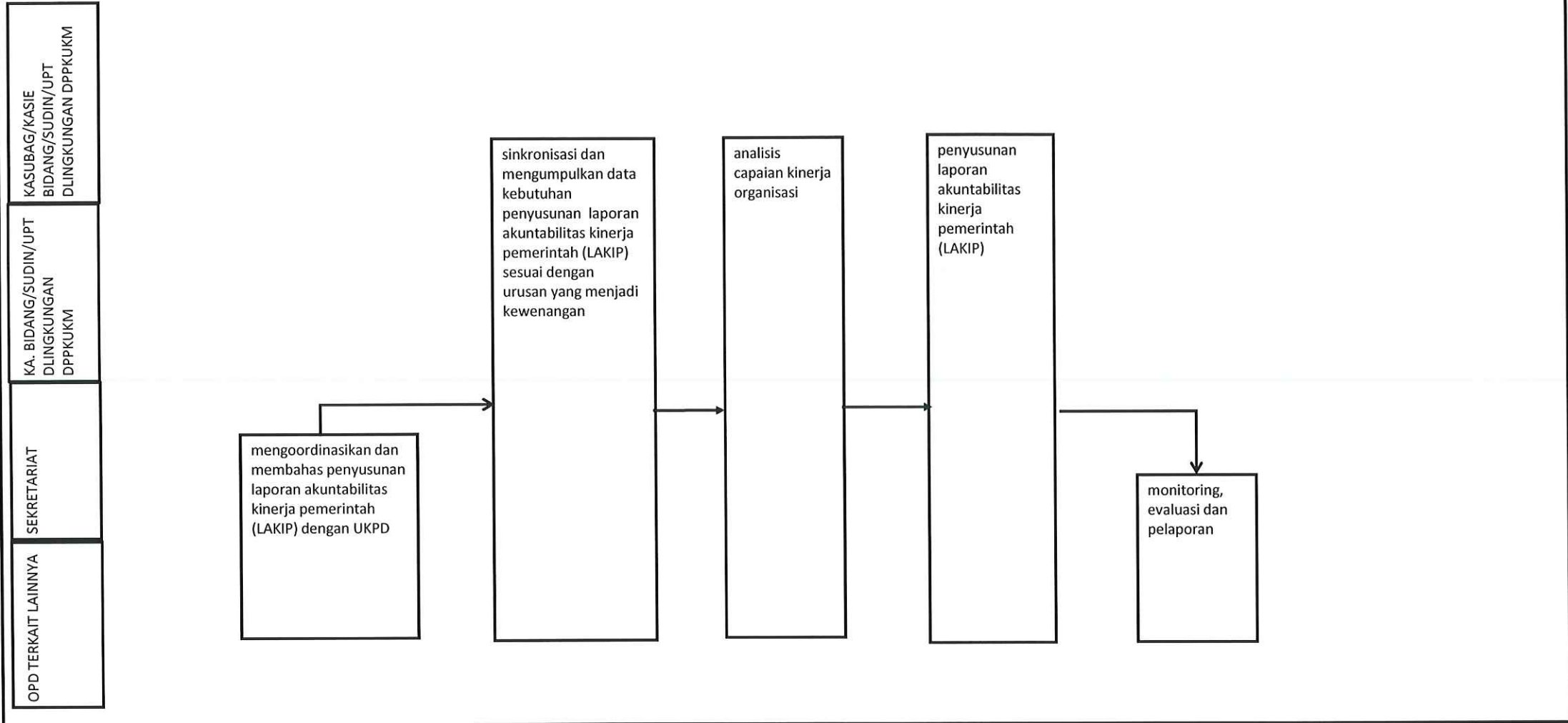
DKI-01.02 CFM.2 PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) GUBERNUR

PETA LINTAS FUNGSI (CROSS-FUNCTIONAL MAP/CFM)



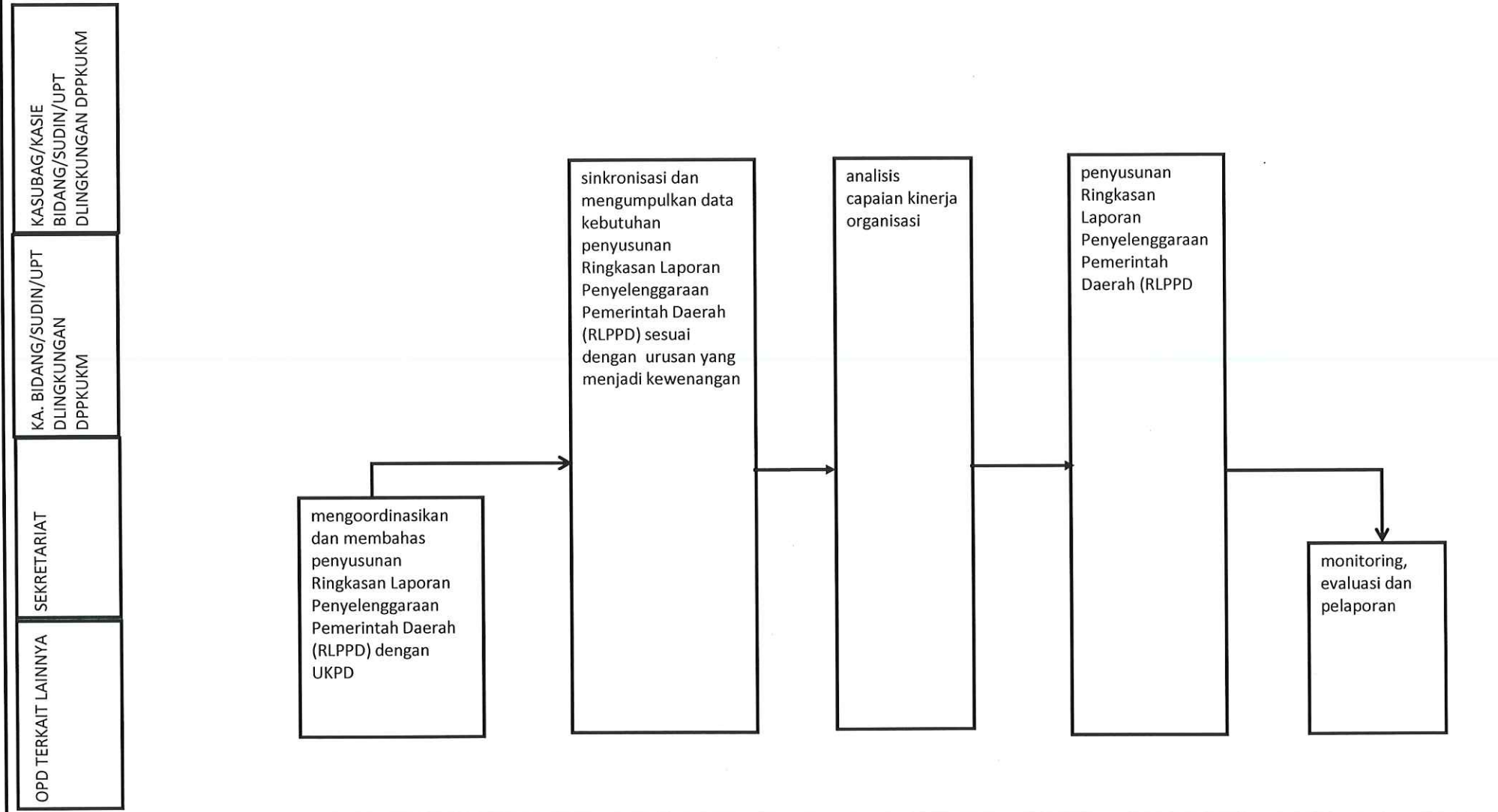
DKI-01.02 CFM.3 PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)

PETA LINTAS FUNGSI (CROSS-FUNCTIONAL MAP/CFM)



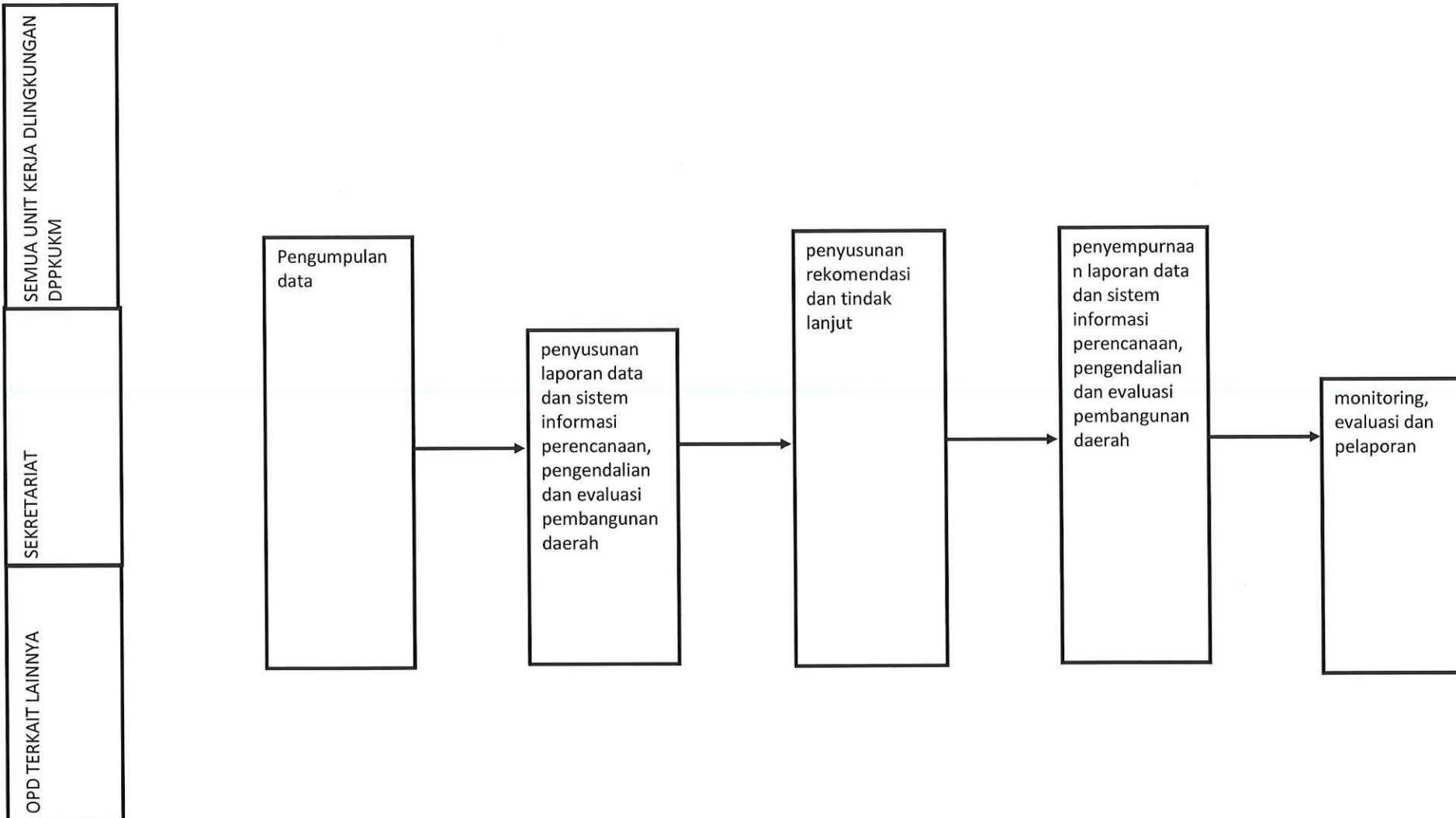
DKI-01.02 CFM.4 PENYUSUNAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD)

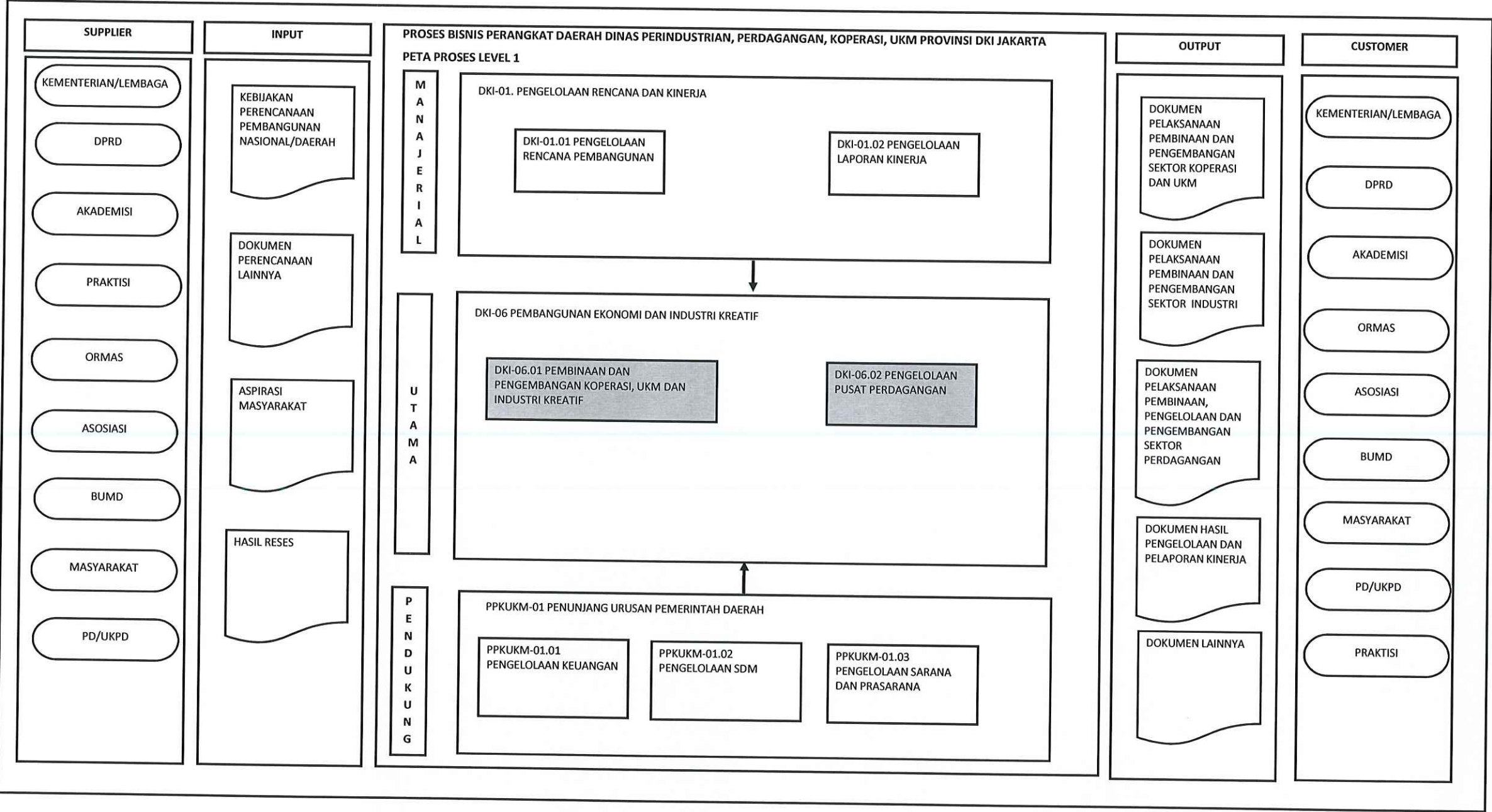
PETA LINTAS FUNGSI (CROSS-FUNCTIONAL MAP/CFM)

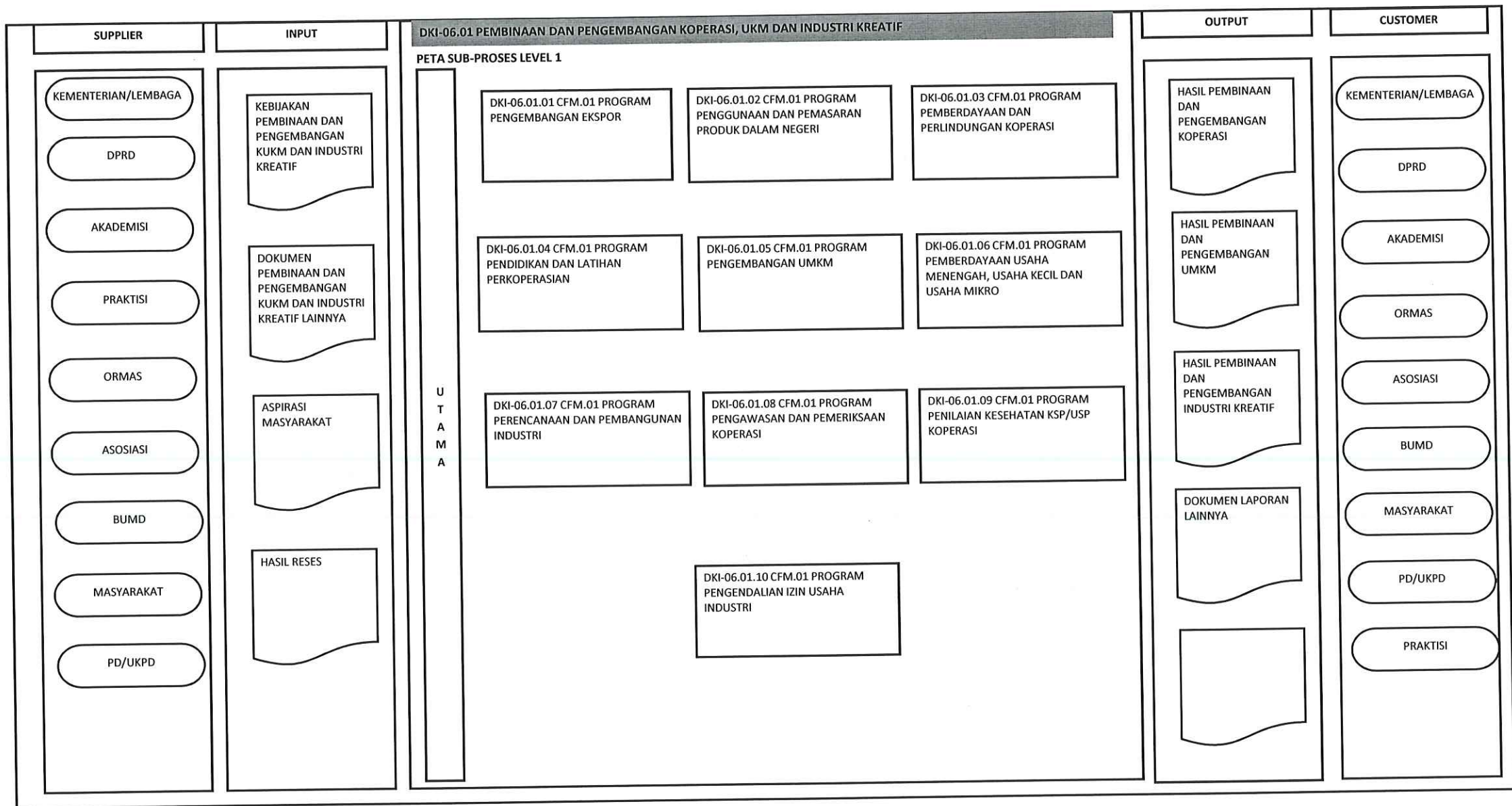


DKI-01.02 CFM.5 PENYUSUNAN LAPORAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

PETA LINTAS FUNGSI (CROSS-FUNCTIONAL MAP/CFM)



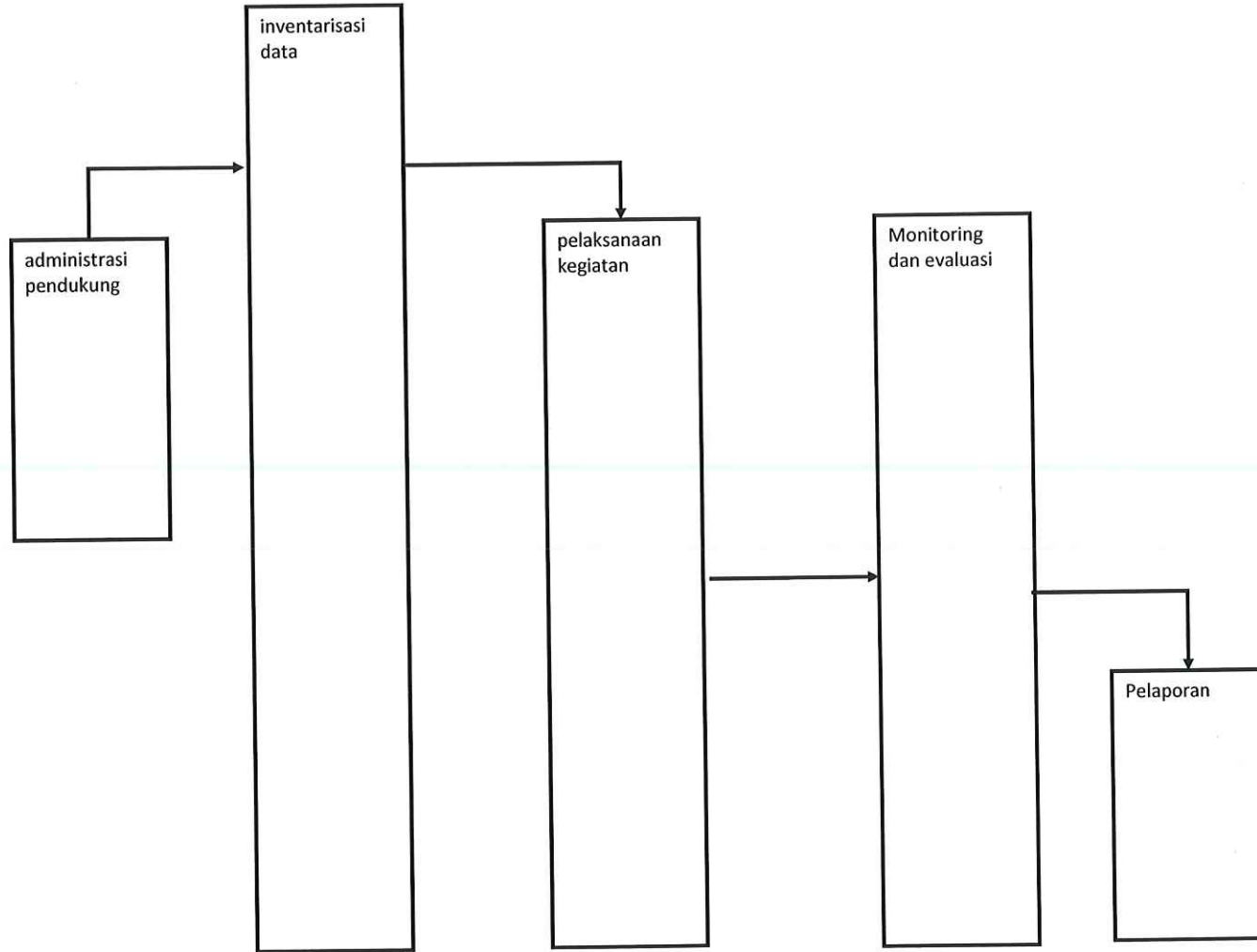




DKI-06.01.01 CFM.01 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

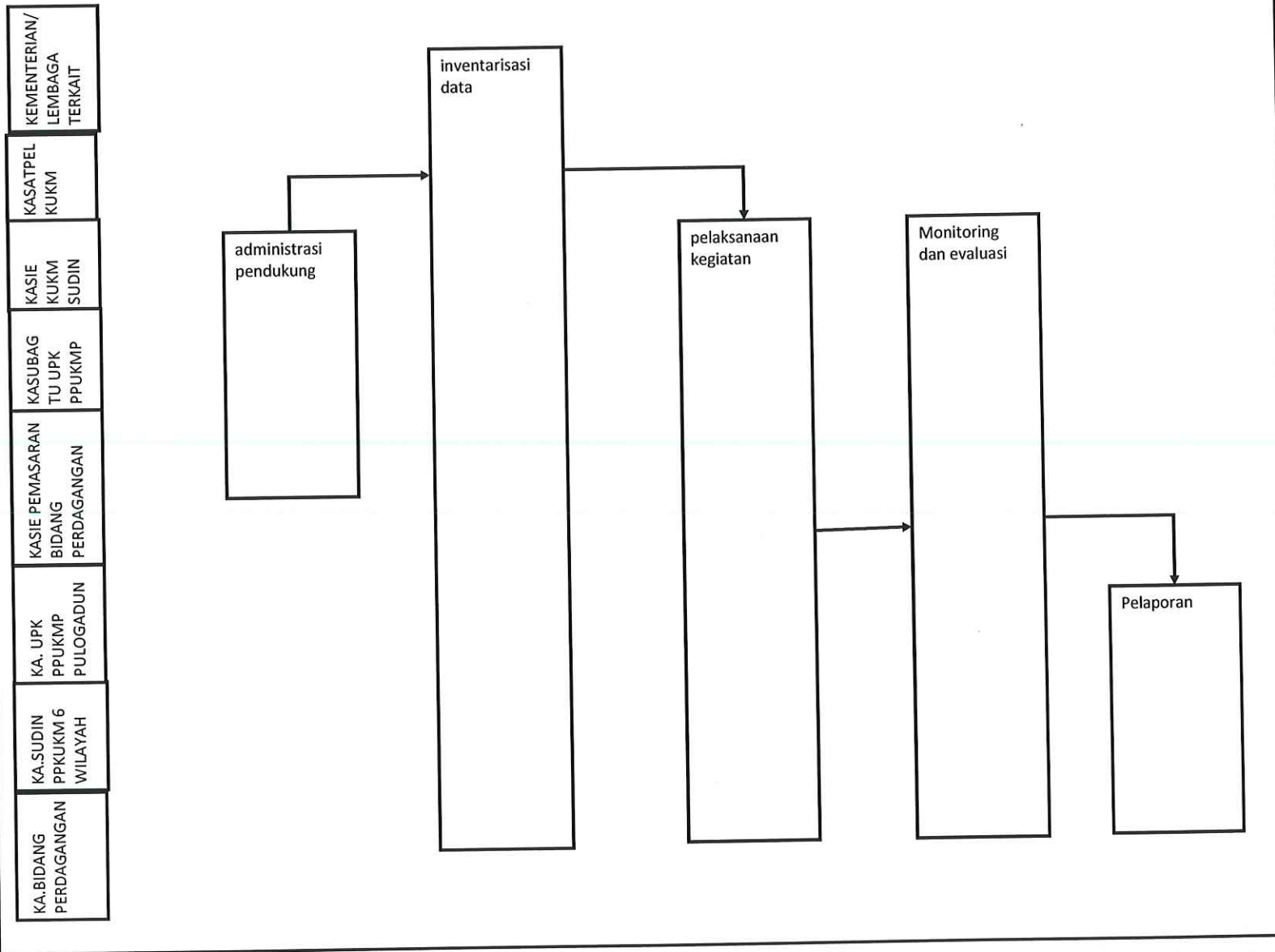
PETA LINTAS FUNGSI (CROSS-FUNCTIONAL MAP/CFM)

KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT
KASATPEL KUKM
KASIE KUKM SUDIN
KA.SUBAG TU UPK PPUKMP
KASIE PLN BIDANG PERDAGANGAN
KA. UPK PPUKMP PULOGADUNG
KA.SUDIN PPUKM 6 WILAYAH
KA.BIDANG PERDAGANGAN



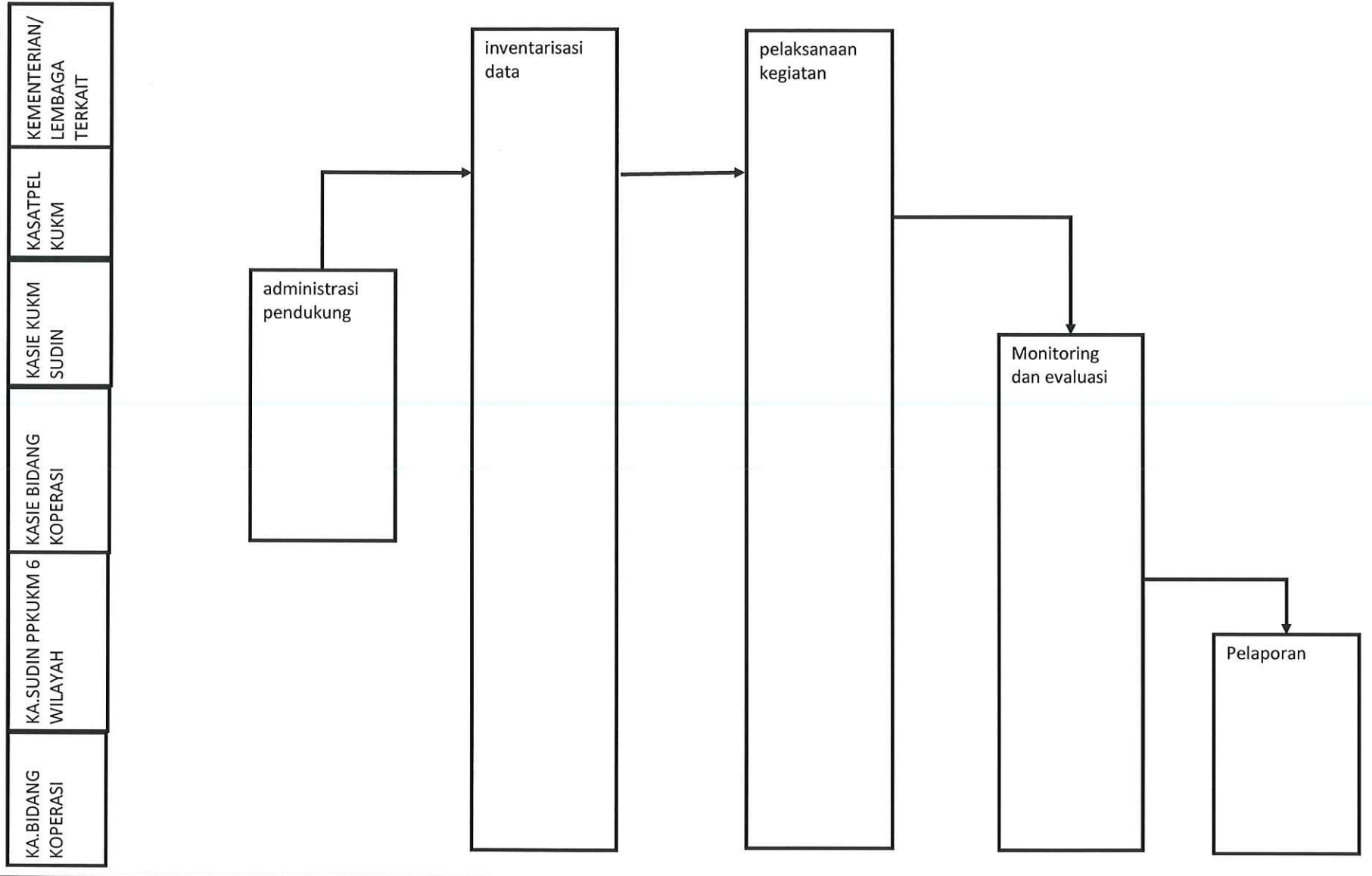
DKI-06.01.02 CFM.01 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

PETA LINTAS FUNGSI (CROSS-FUNCTIONAL MAP/CFM)

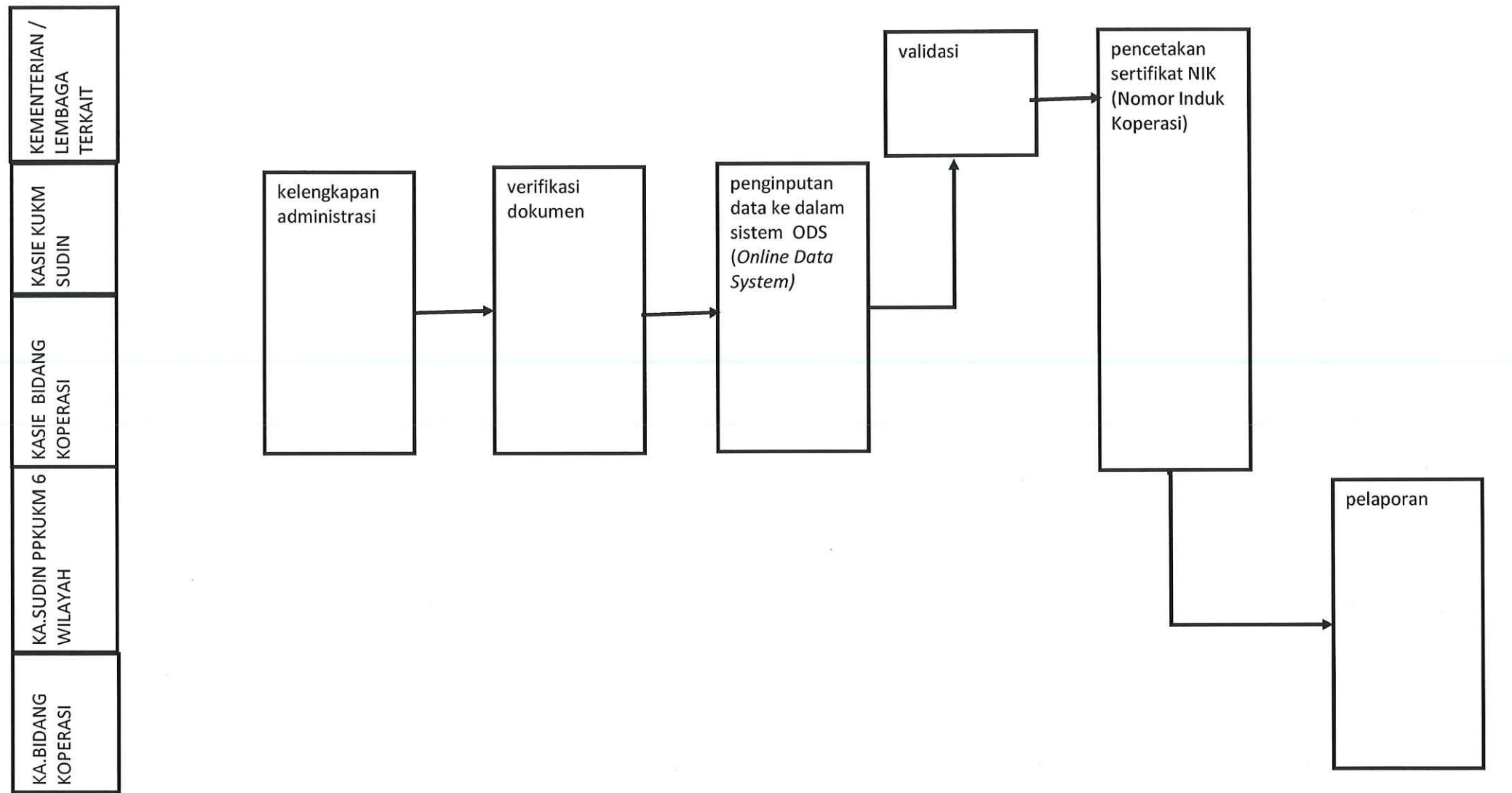


DKI-06.01.03 CFM.01 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

PETA LINTAS FUNGSI (CROSS-FUNCTIONAL MAP/CFM)

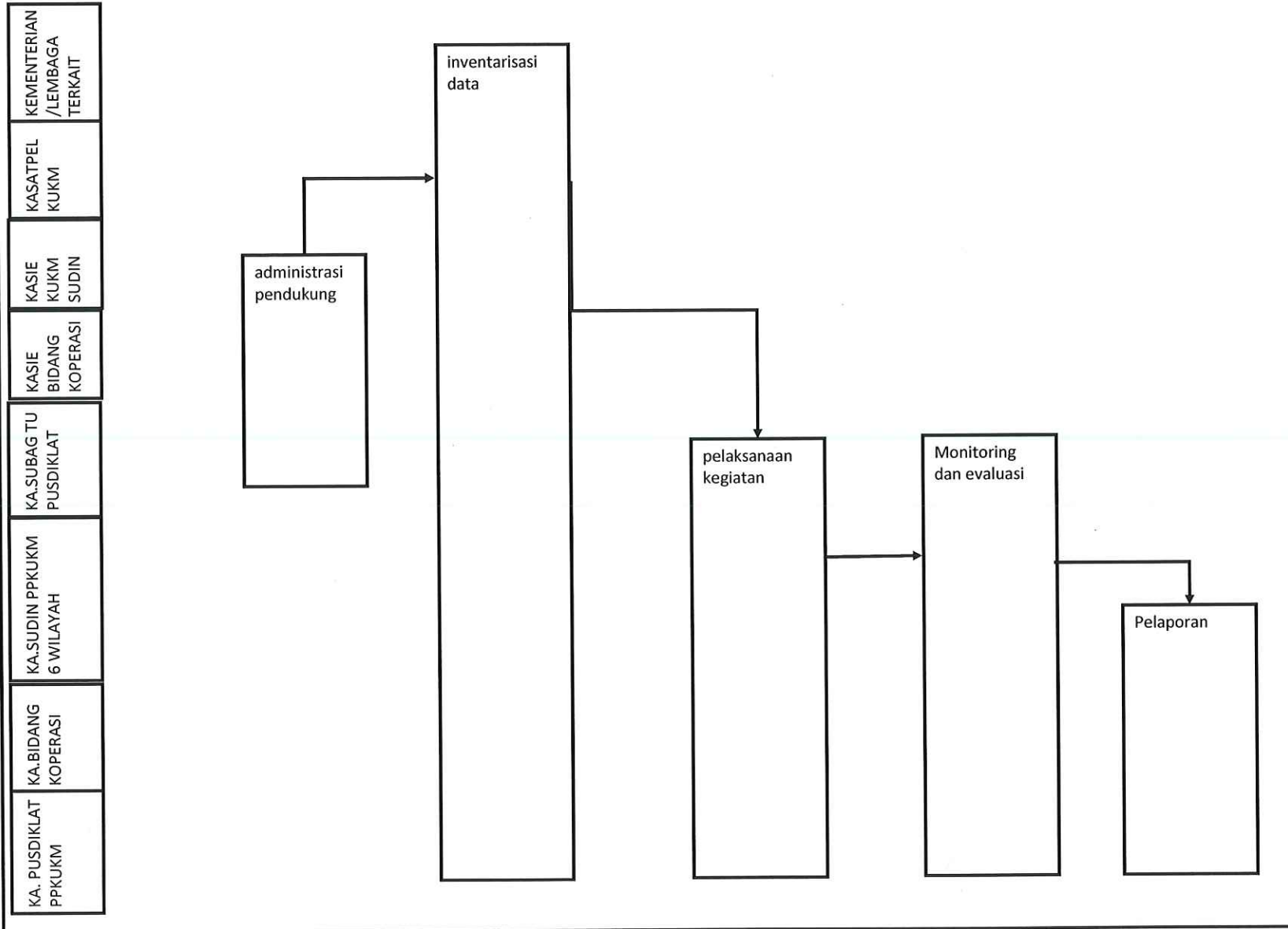


PETA LINTAS FUNGSI (CROSS-FUNCTIONAL MAP/CFM)

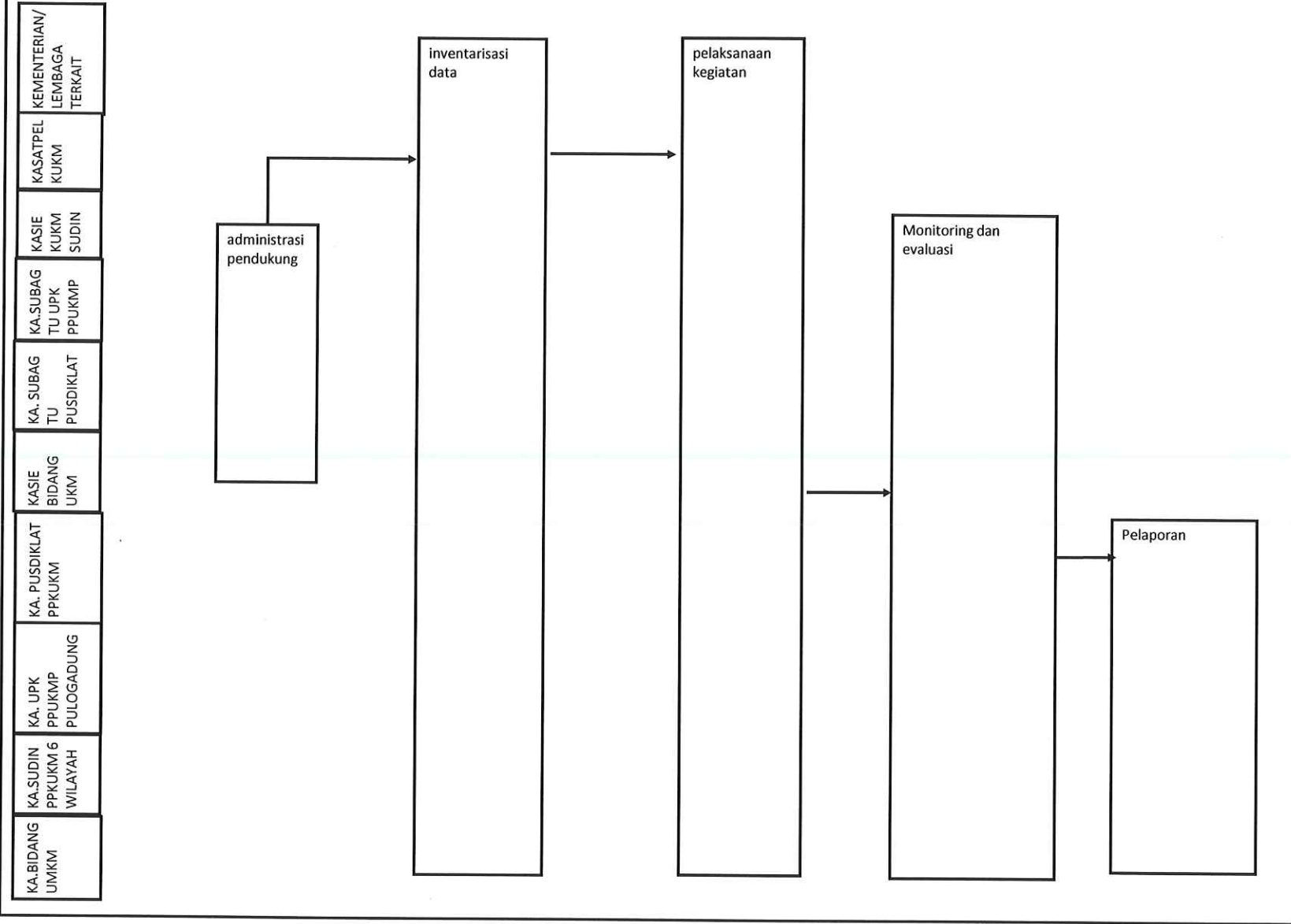


DKI-06.01.04 CFM.01 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

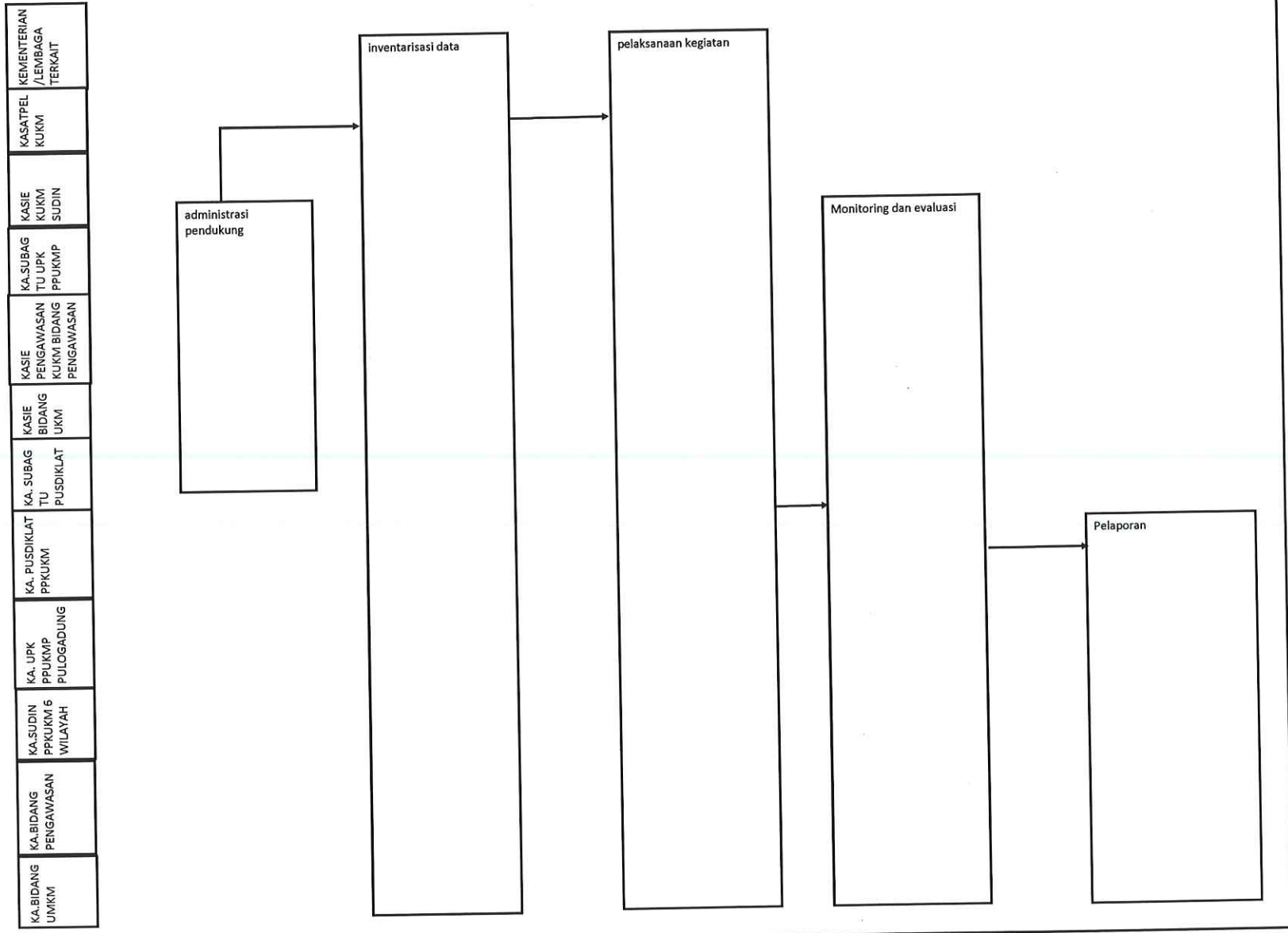
PETA LINTAS FUNGSI (CROSS-FUNCTIONAL MAP/CFM)

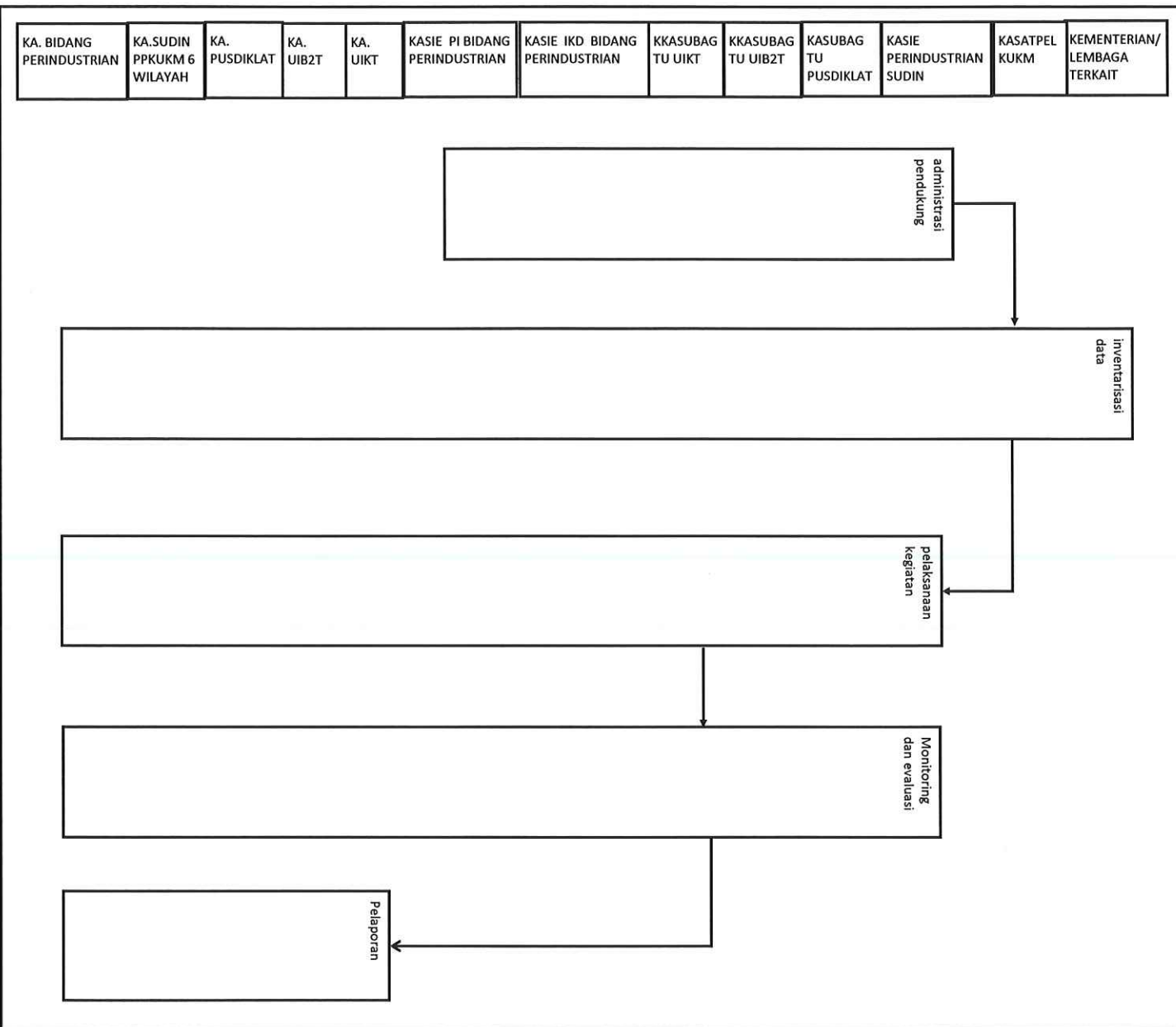


PETA LINTAS FUNGSI (CROSS-FUNCTIONAL MAP/CFM)



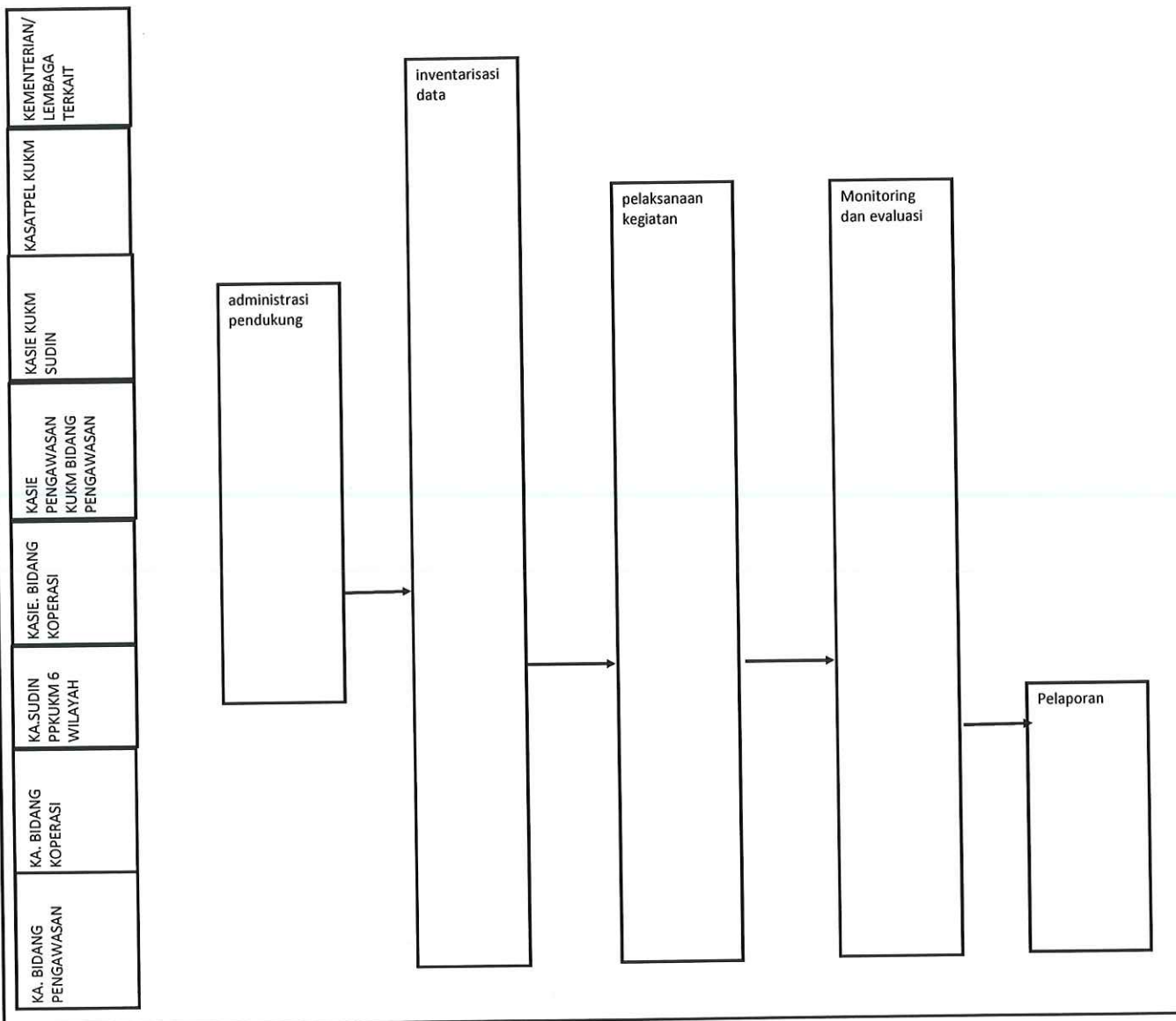
PETA LINTAS FUNGSI (CROSS-FUNCTIONAL MAP/CFM)





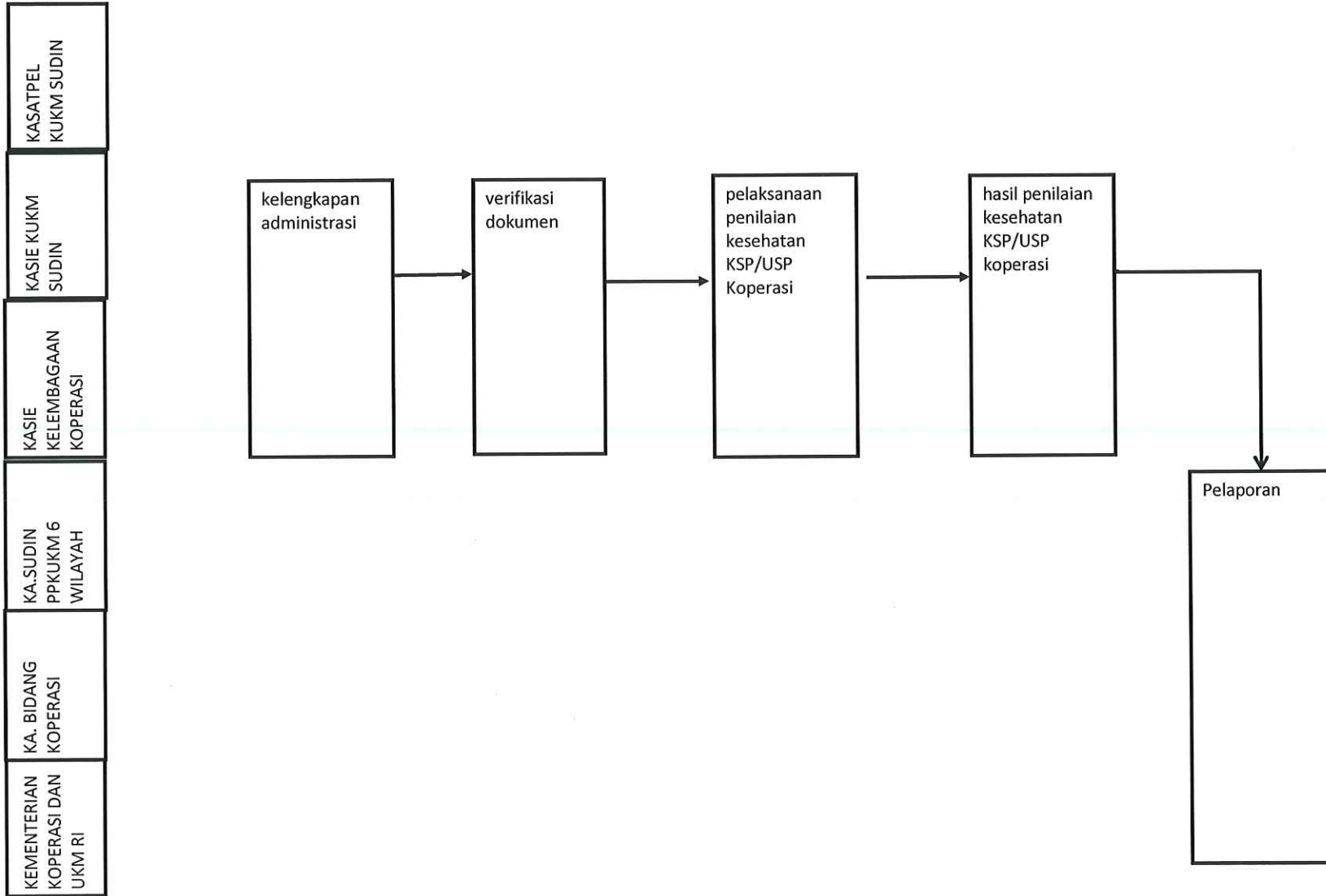
DKI-06.01.08 CFM.01 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

PETA LINTAS FUNGSI (CROSS-FUNCTIONAL MAP/CFM)



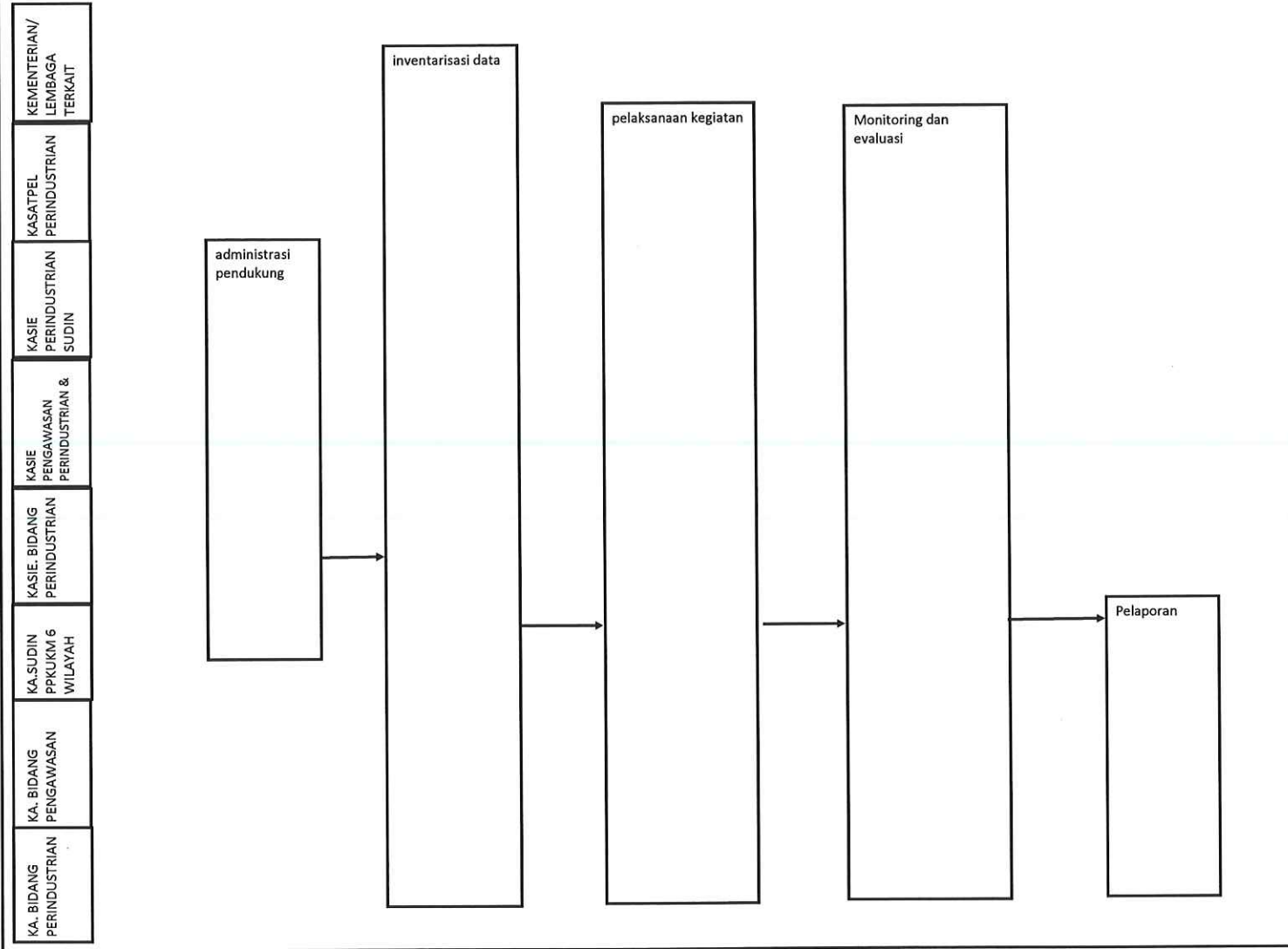
DKI-06.01.09 CFM.01 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

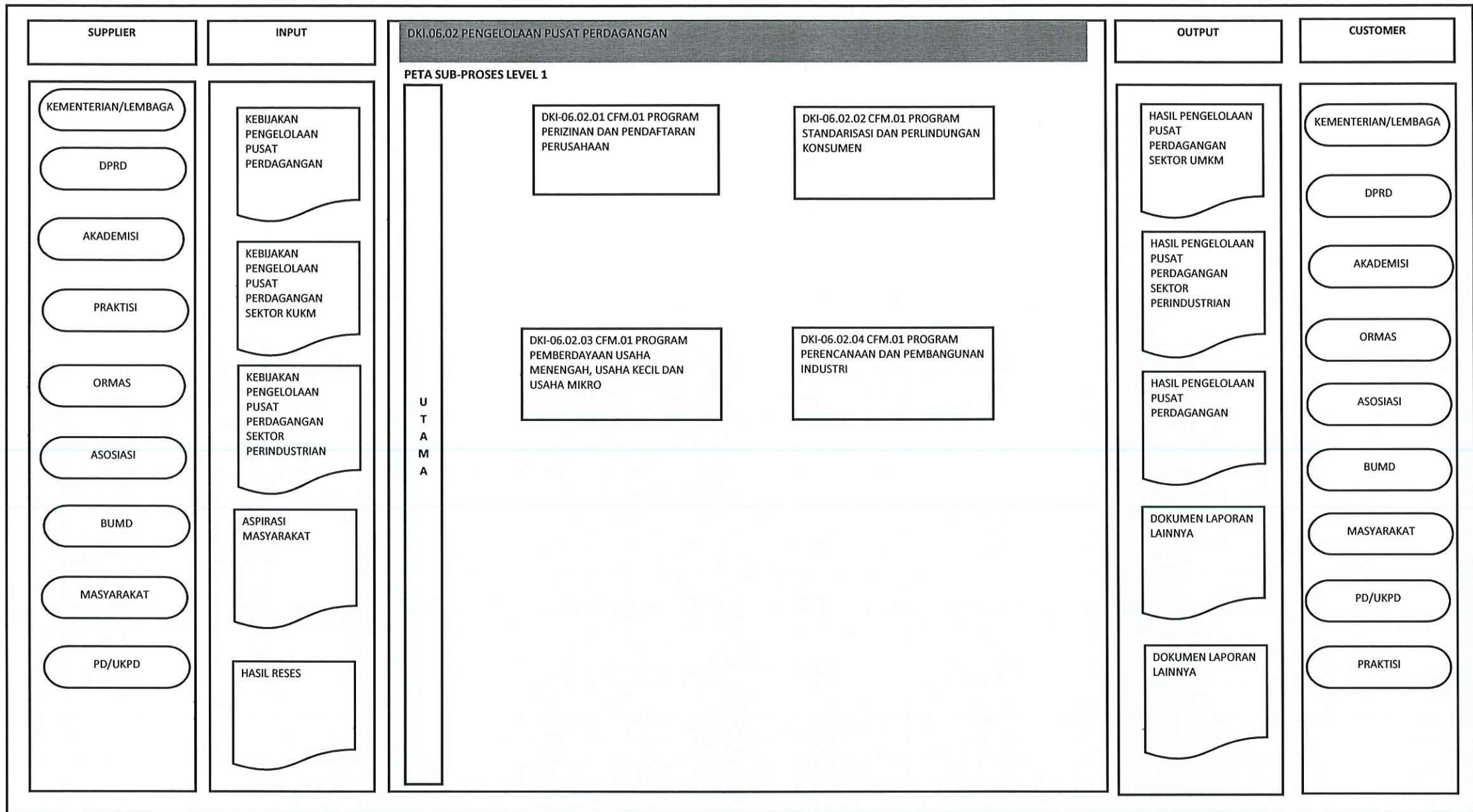
PETA LINTAS FUNGSI (CROSS-FUNCTIONAL MAP/CFM)



DKI-06.01.10 CFM.01 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

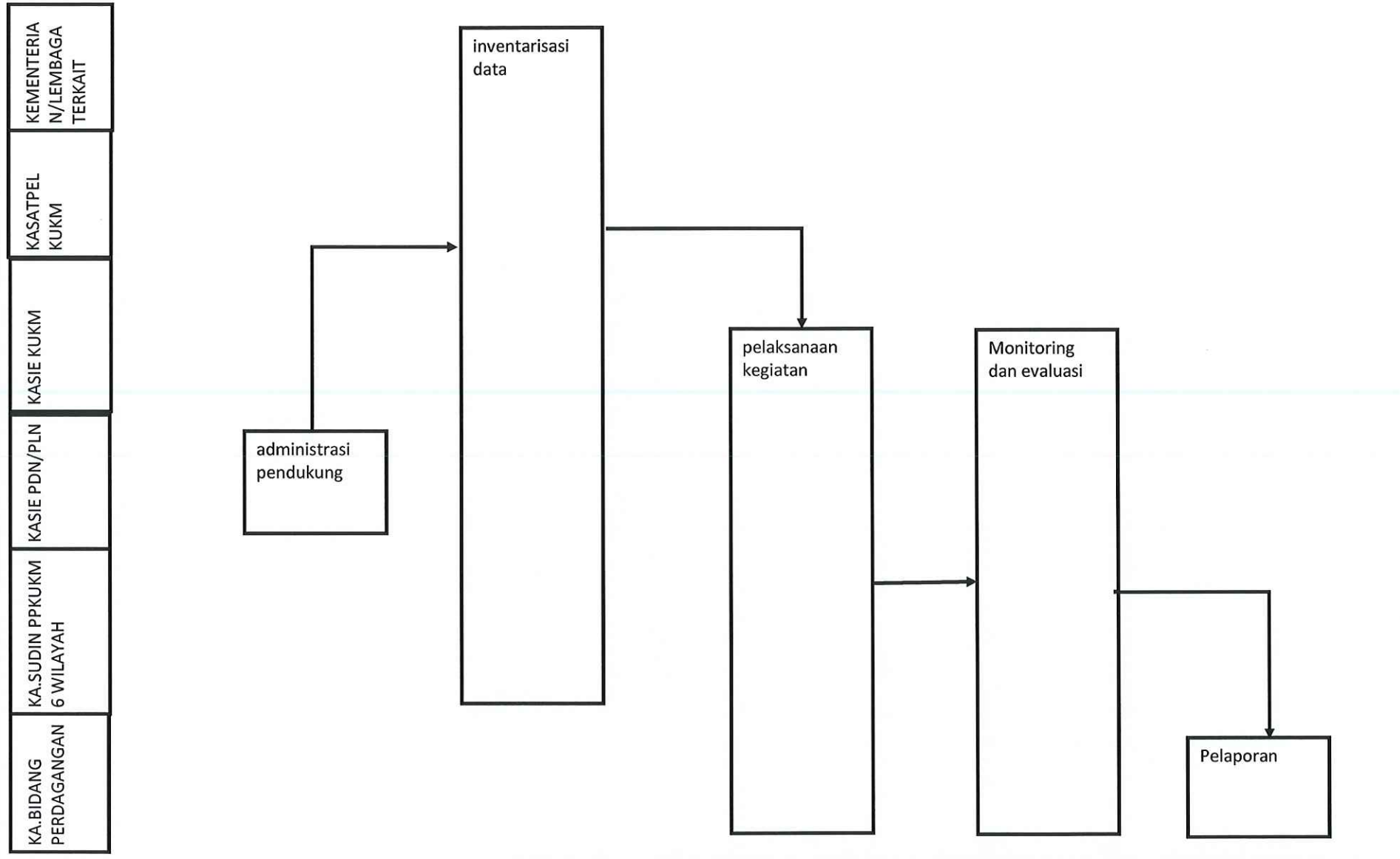
PETA LINTAS FUNGSI (CROSS-FUNCTIONAL MAP/CFM)





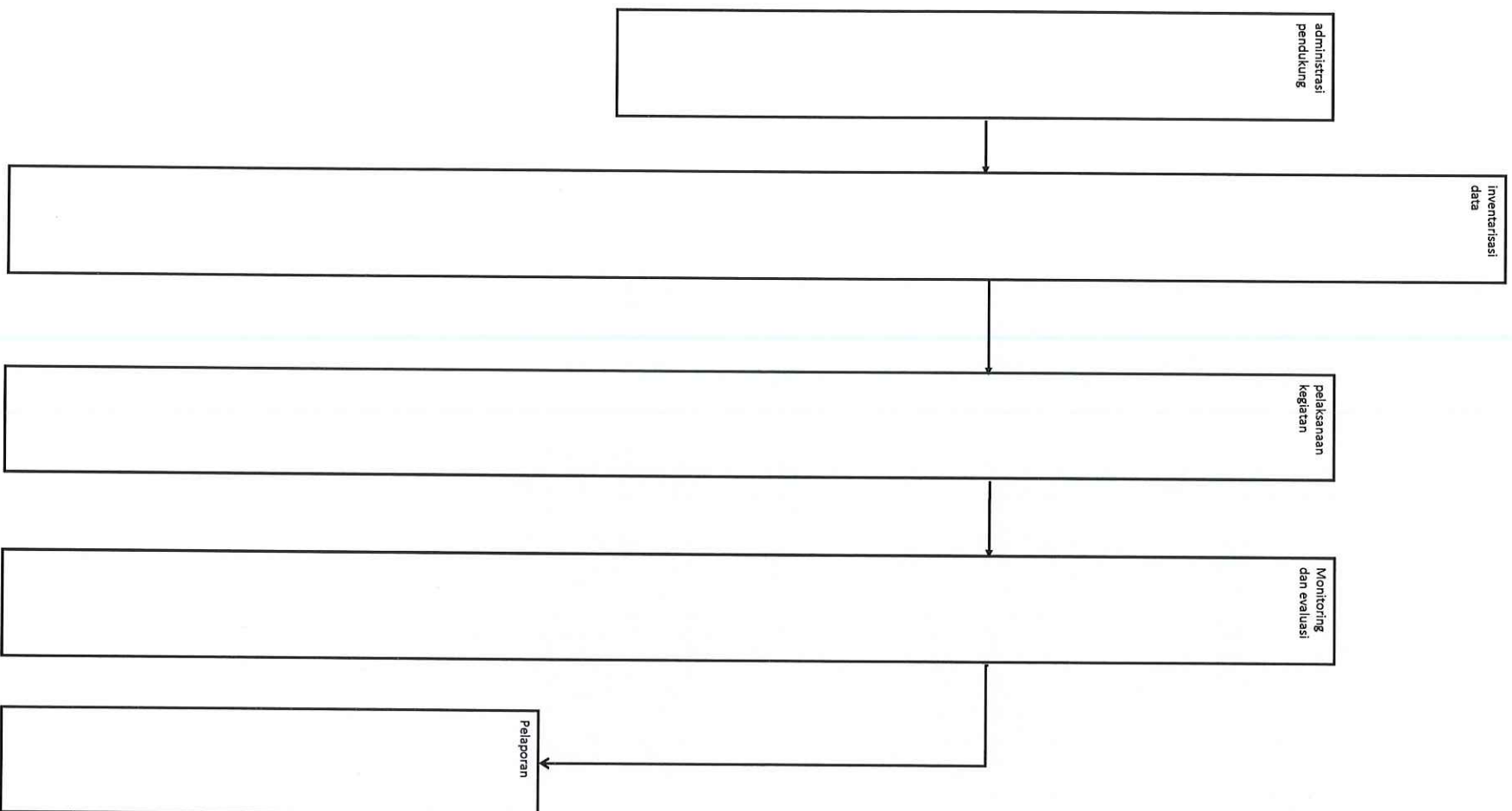
DKI-06.02.01 CFM.01 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

PETA LINTAS FUNGSI (CROSS-FUNCTIONAL MAP/CFM)



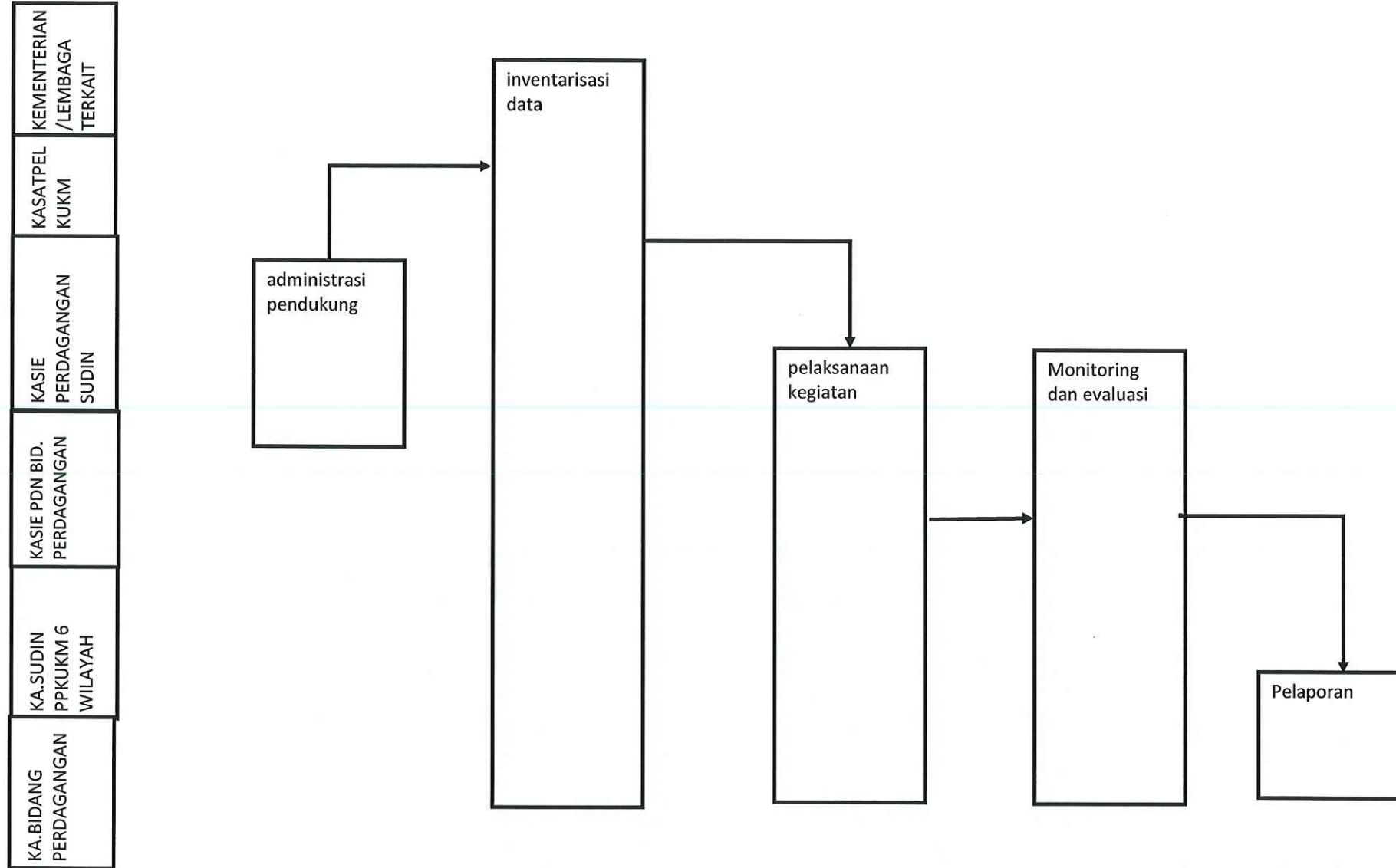
PETA LINTAS FUNGSI (CROSS-FUNCTIONAL MAP/CFM)

KA.BIDANG PENGAWASAN	KA.BIDANG PERDAGANGAN	KA.BIDANG PERINDUSTRIAN	KA.SUDIN PPKUKM 6 WILAYAH	KA. UIB2T	KA. UIKT	UP METROLOGI	KASIE BIDANG PERINDUSTRIAN	KASIE BIDANG PENGAWASAN	KASIE BIDANG PERDAGANGAN	KASIE PERDAGANGAN SUDIN	KASIE PERINDUSTRIAN SUDIN	KASUBAG TU METROLOGI	KASUBAG TU UIKT	KASUBAG TU UIB2T	KASATPEL PPKUKM	KEMENTERIAN /LEMBAGA TERKAIT
----------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------	-----------	----------	--------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------------------

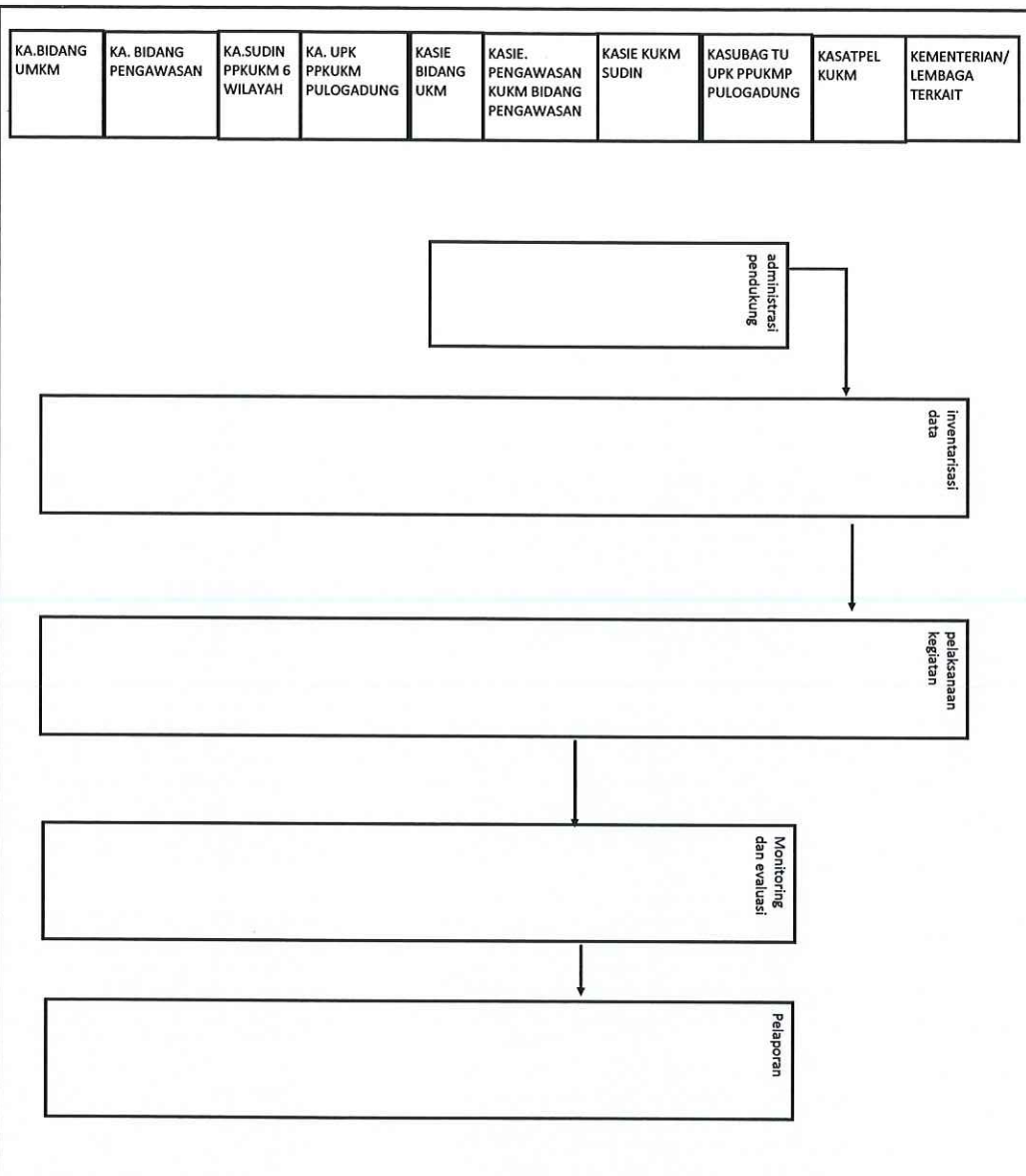


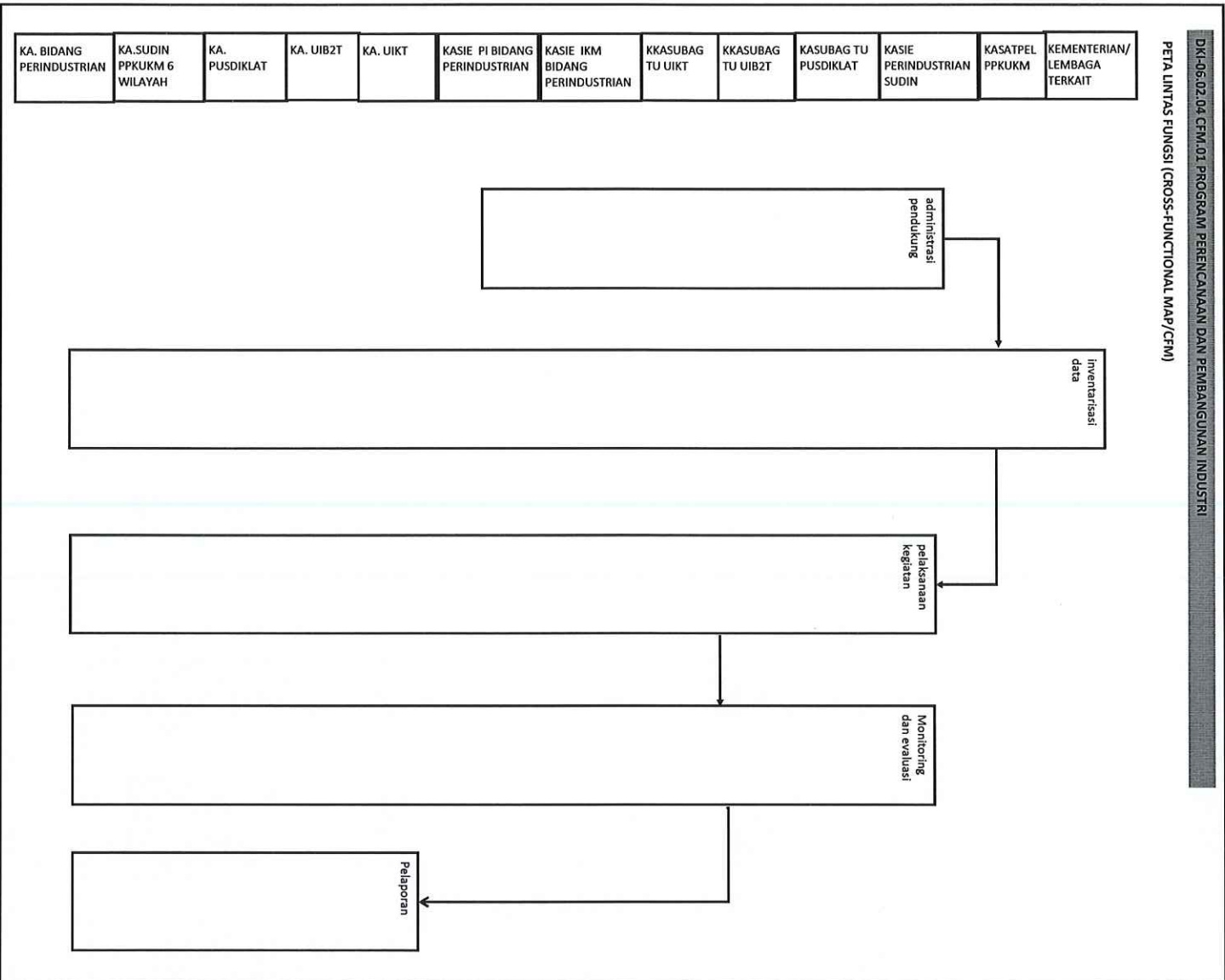
DKI-06.02.02 CFM.02 PEMANTAUAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK

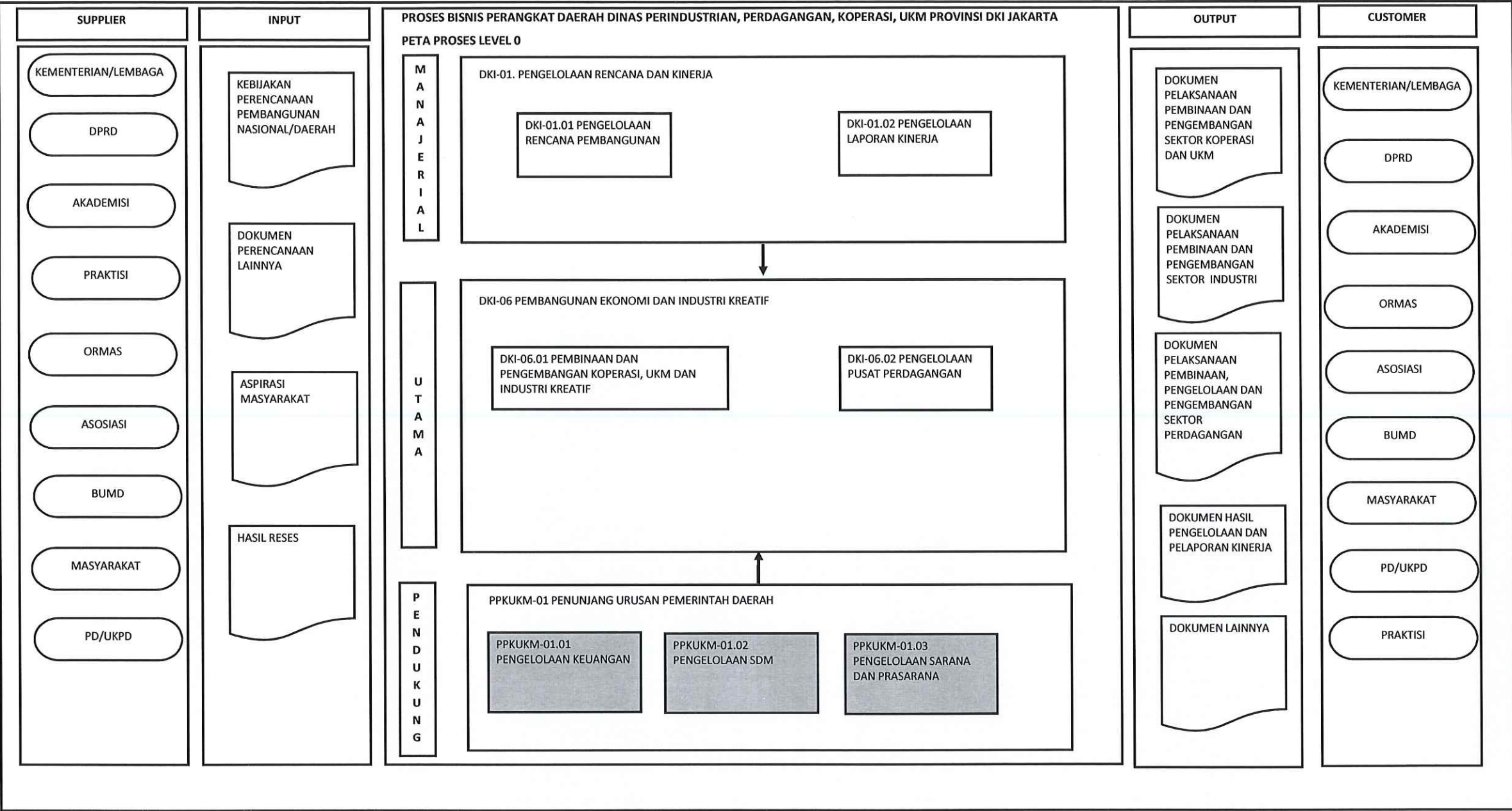
PETA LINTAS FUNGSI (CROSS-FUNCTIONAL MAP/CFM)

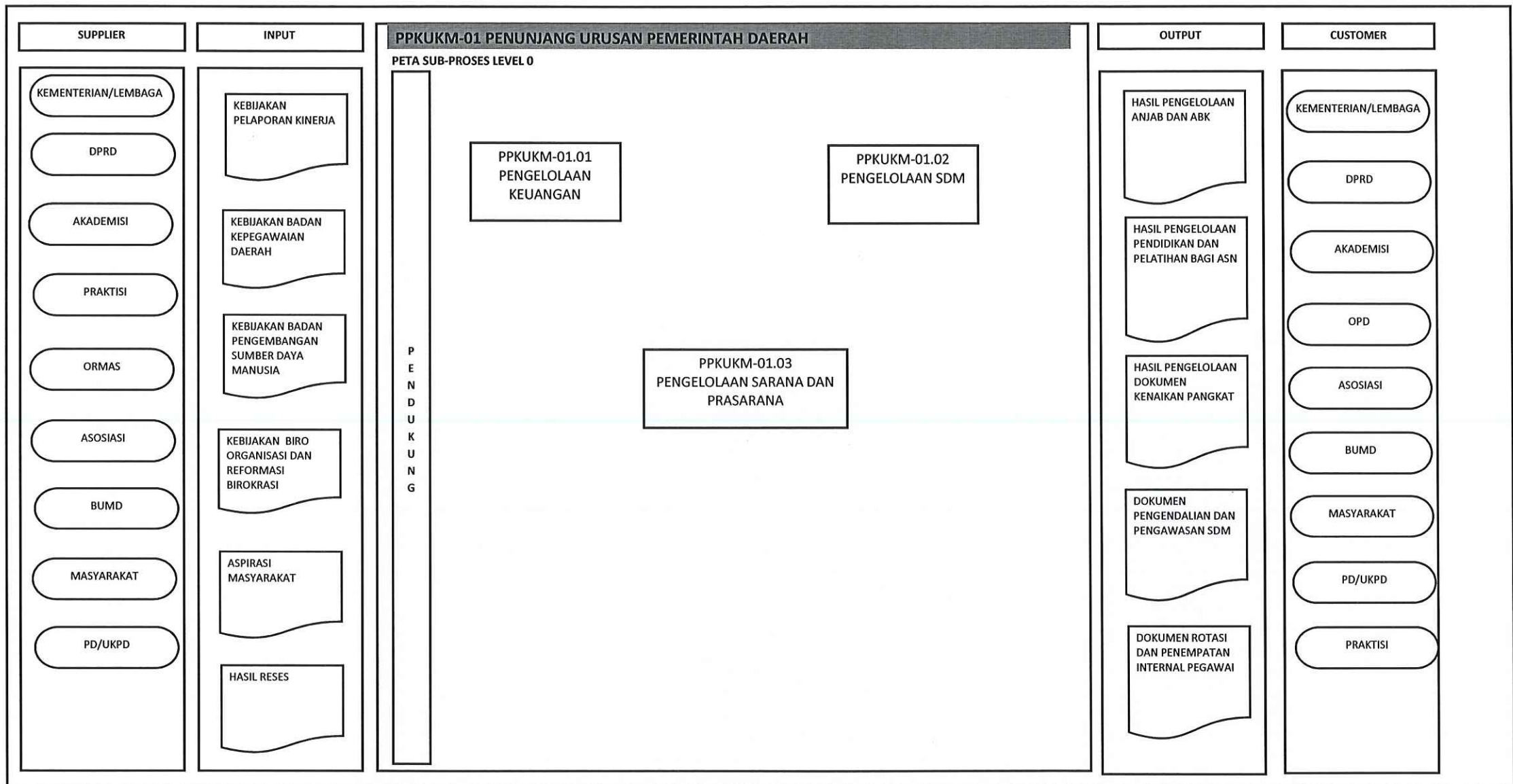


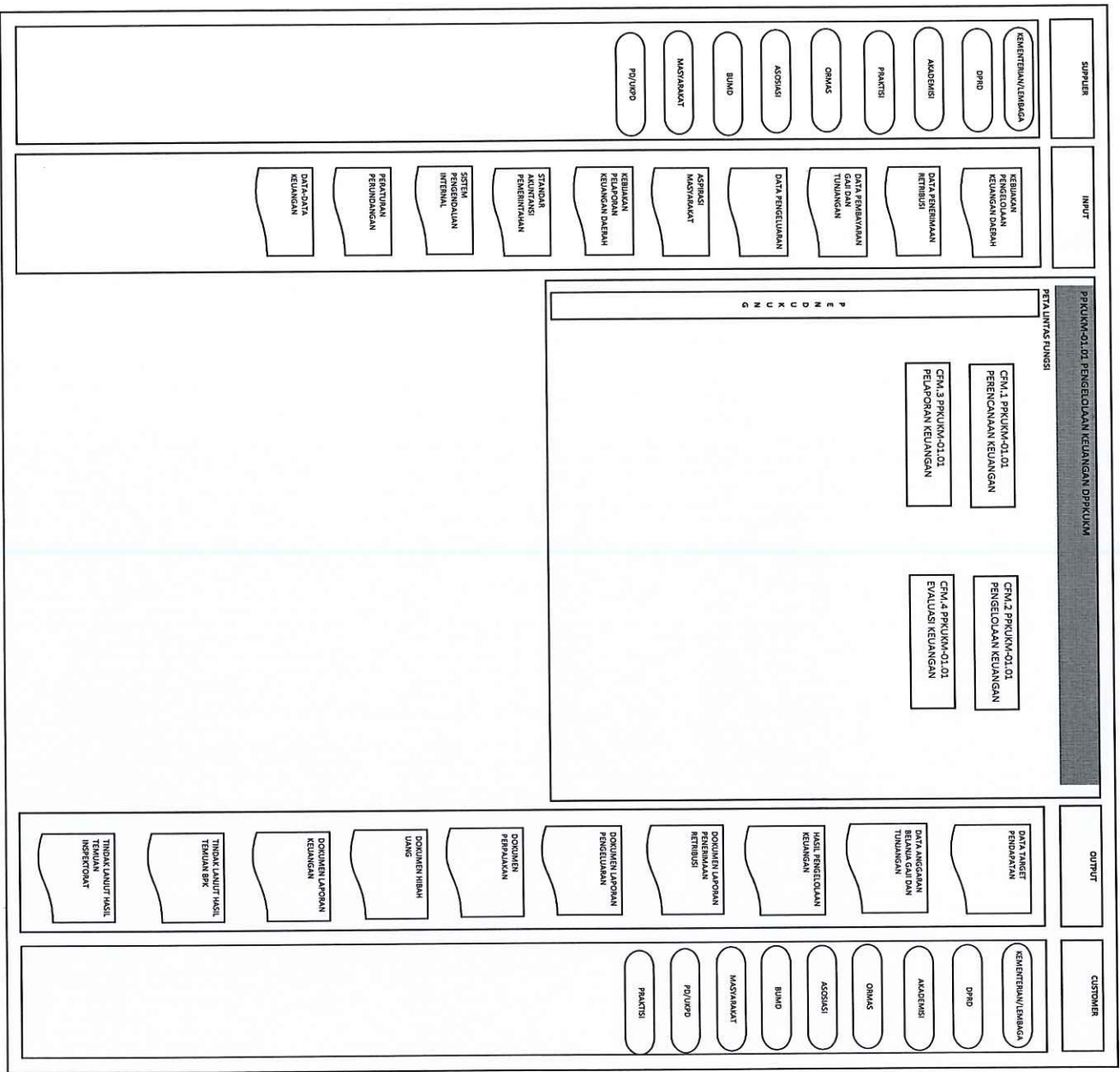
PETA LINTAS FUNGSI (CROSS-FUNCTIONAL MAP/CFM)





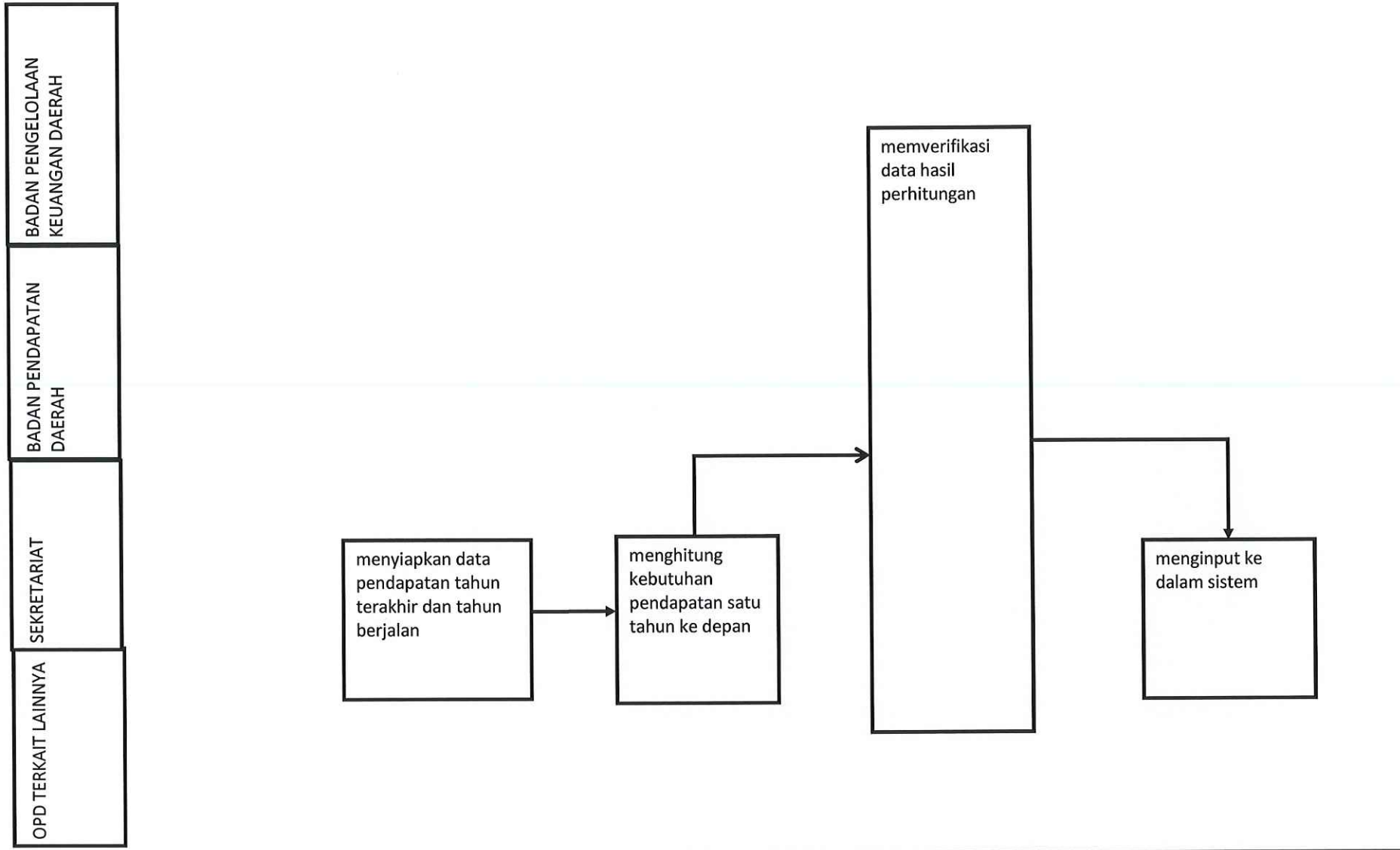






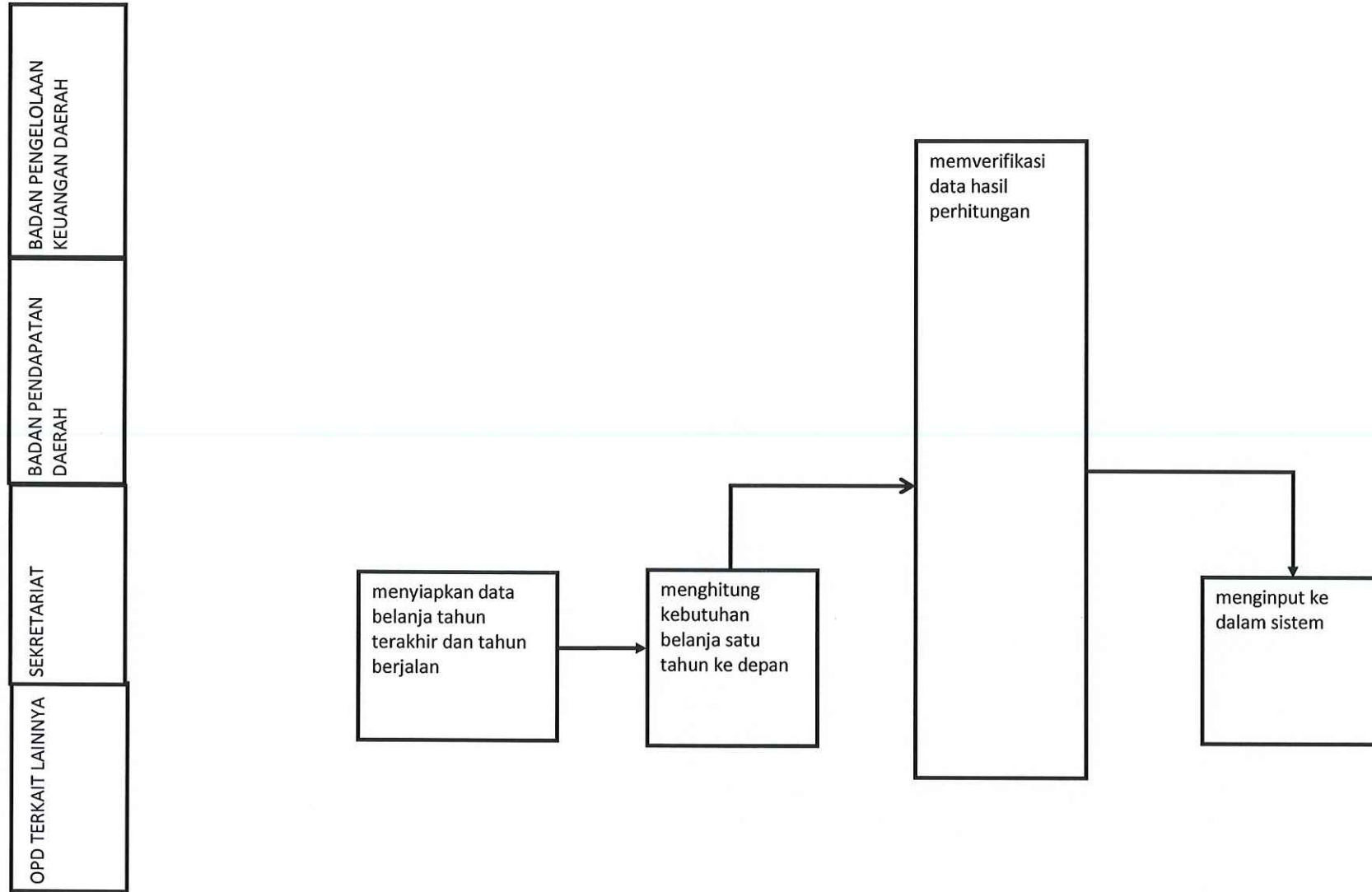
PPKUKM-01.01 CFM-1.1 PERENCANAAN PENDAPATAN

PETA LINTAS FUNGSI (CROSS-FUNCTIONAL MAP/CFM)



PPKUKM-01.01 CFM-1.2 PERENCANAAN GAJI DAN TUNJANGAN

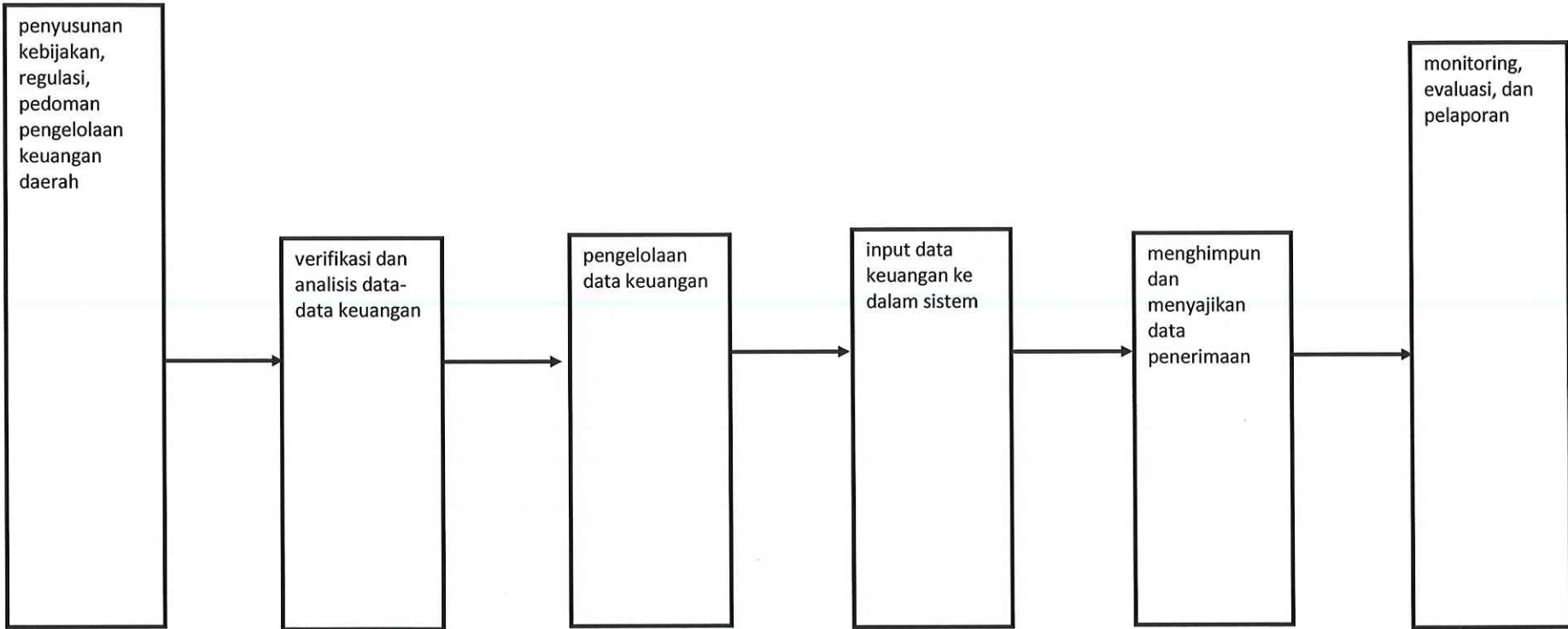
PETA LINTAS FUNGSI (CROSS-FUNCTIONAL MAP/CFM)



PPKUM-01.01 CFM-2.1 PENDAPATAN DAERAH

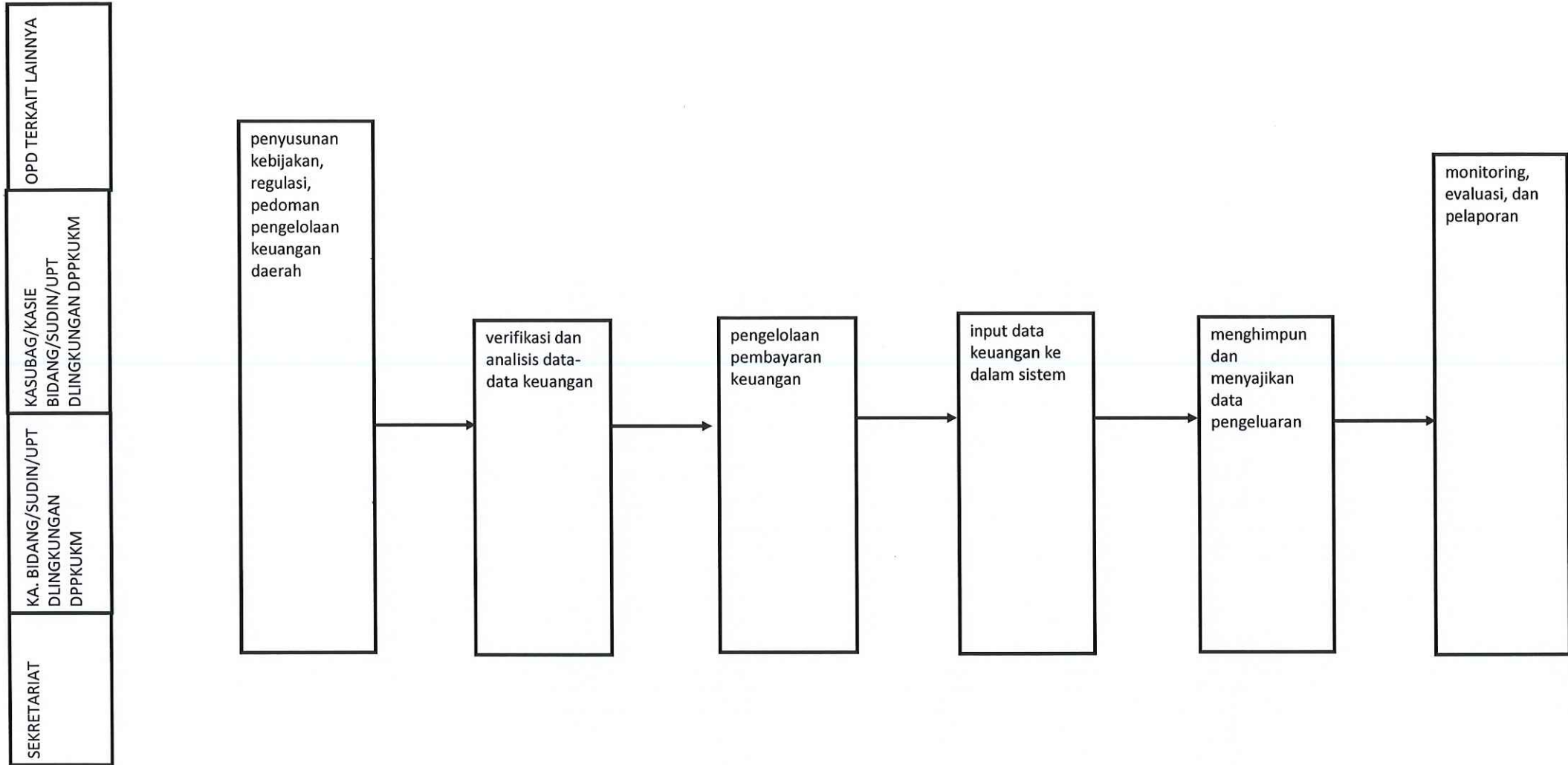
PETA LINTAS FUNGSI (CROSS-FUNCTIONAL MAP/CFM)

SEKRETARIAT
KA. BIDANG/SUDIN/UPT DLINGKUNGAN DPPKUM
KASUBAG/KASIE BIDANG/SUDIN/UPT DLINGKUNGAN DPPKUM
OPD TERKAIT LAINNYA



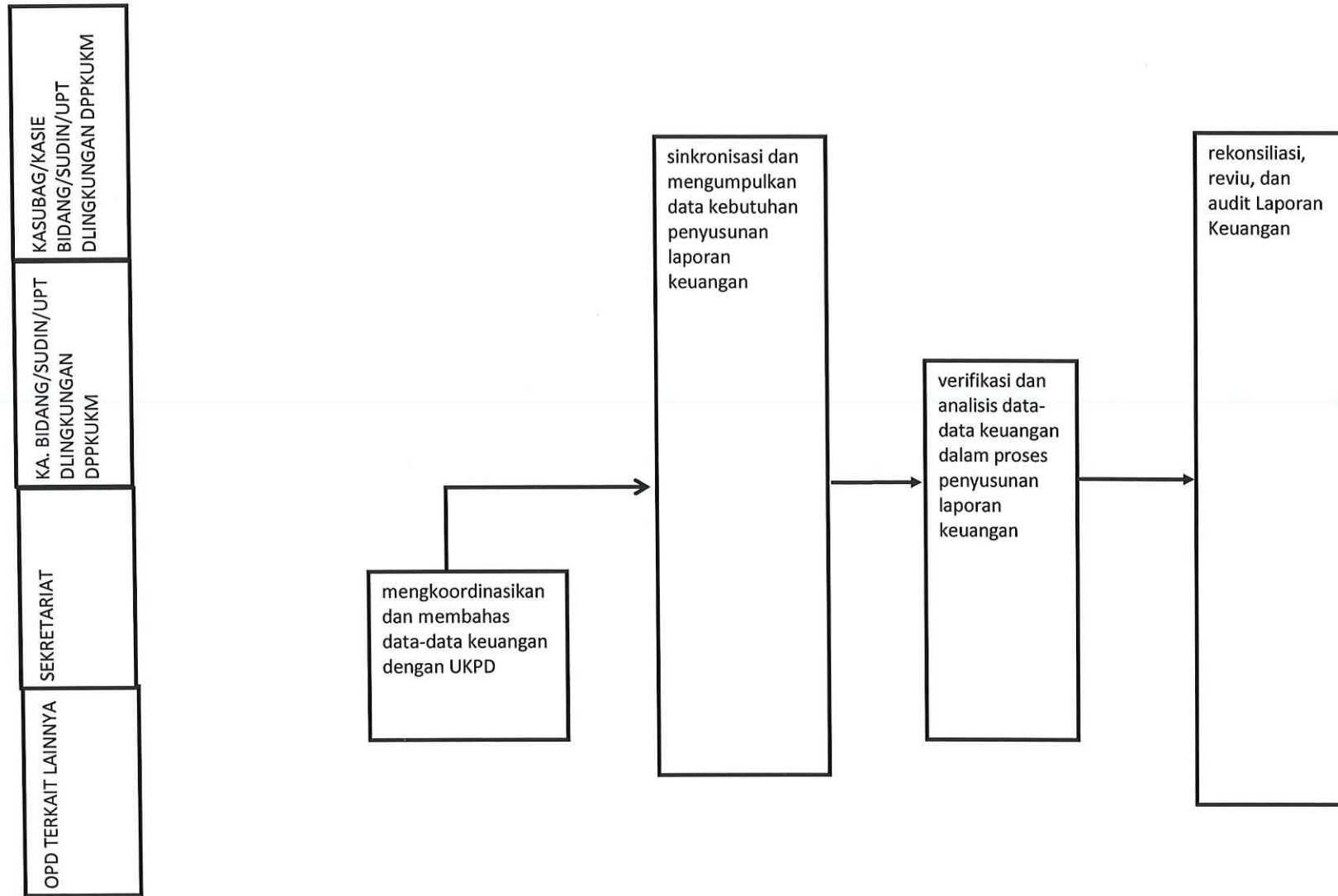
PPKUKM-01.01 CFM-2.2 BELANJA DAERAH

PETA LINTAS FUNGSI (CROSS-FUNCTIONAL MAP/CFM)



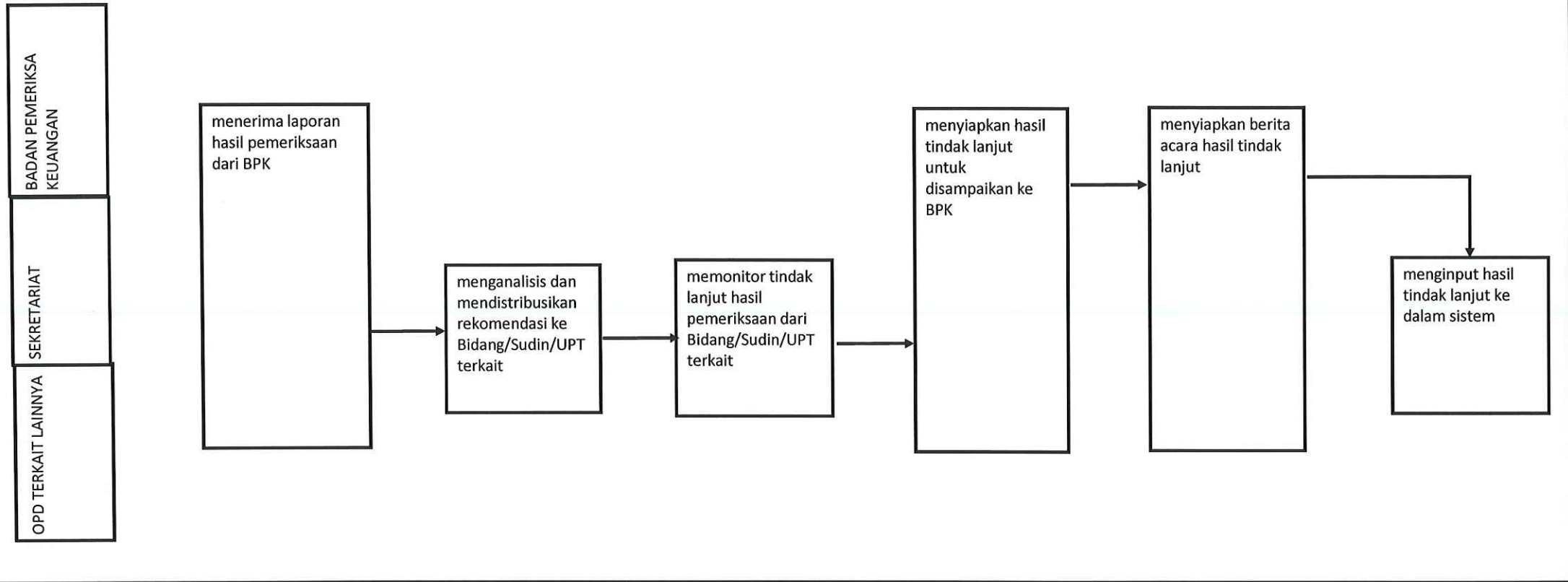
PPKUKM-01.01 CFM-3.1 PELAPORAN KEUANGAN

PETA LINTAS FUNGSI (CROSS-FUNCTIONAL MAP/CFM)



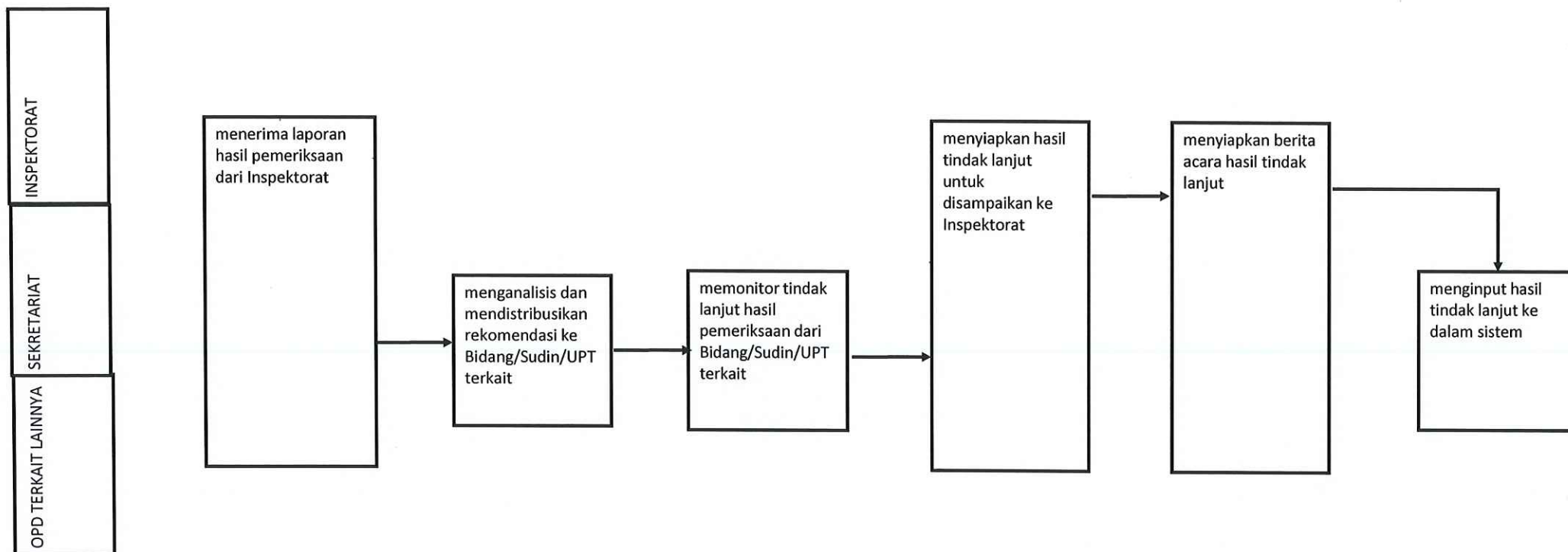
PPKUKM-01.01 CFM-4.1 PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)

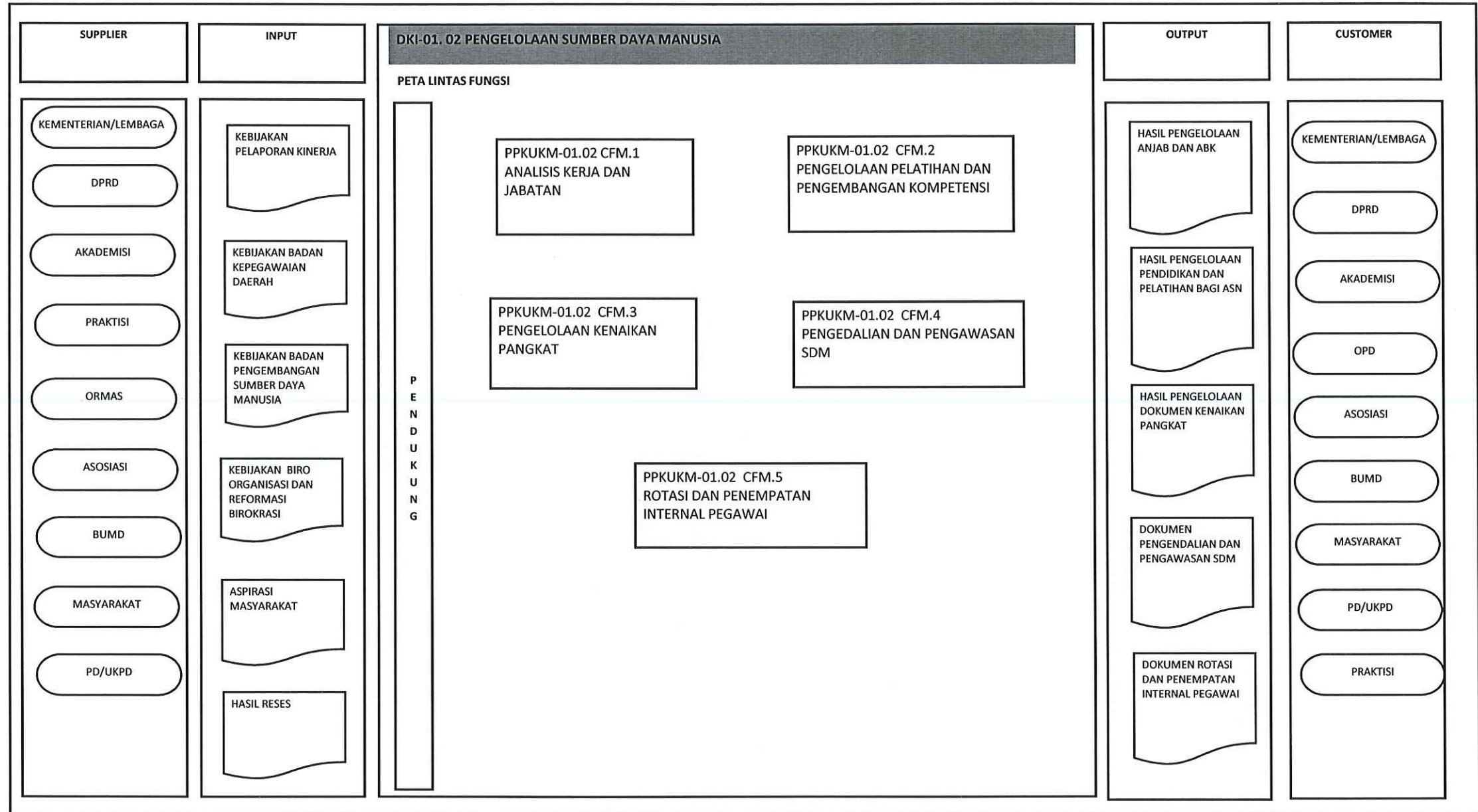
PETA LINTAS FUNGSI (CROSS-FUNCTIONAL MAP/CFM)



PPKUKM-01.01 CFM-4.2 PEMERIKSAAN INSPEKTORAT

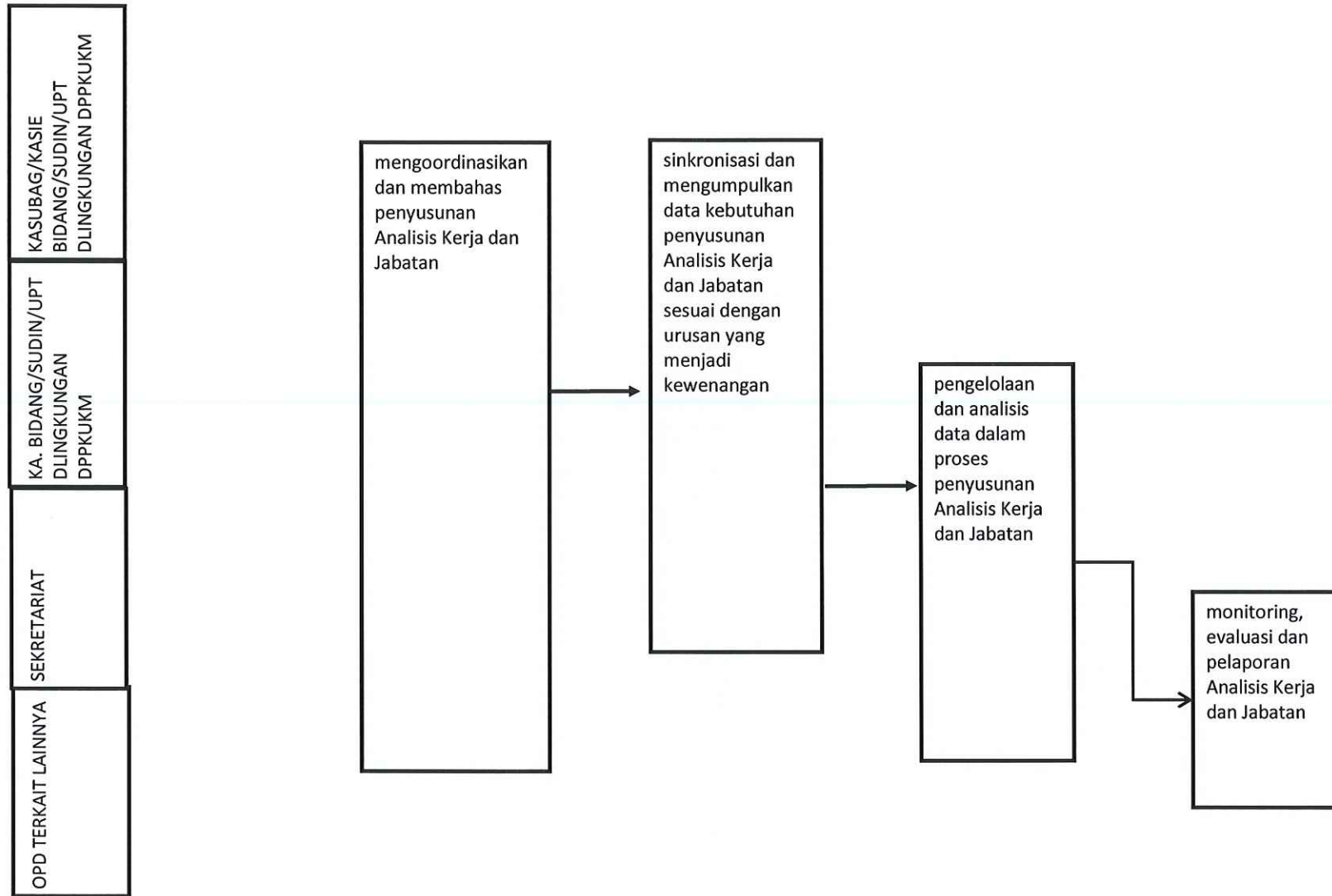
PETA LINTAS FUNGSI (CROSS-FUNCTIONAL MAP/CFM)





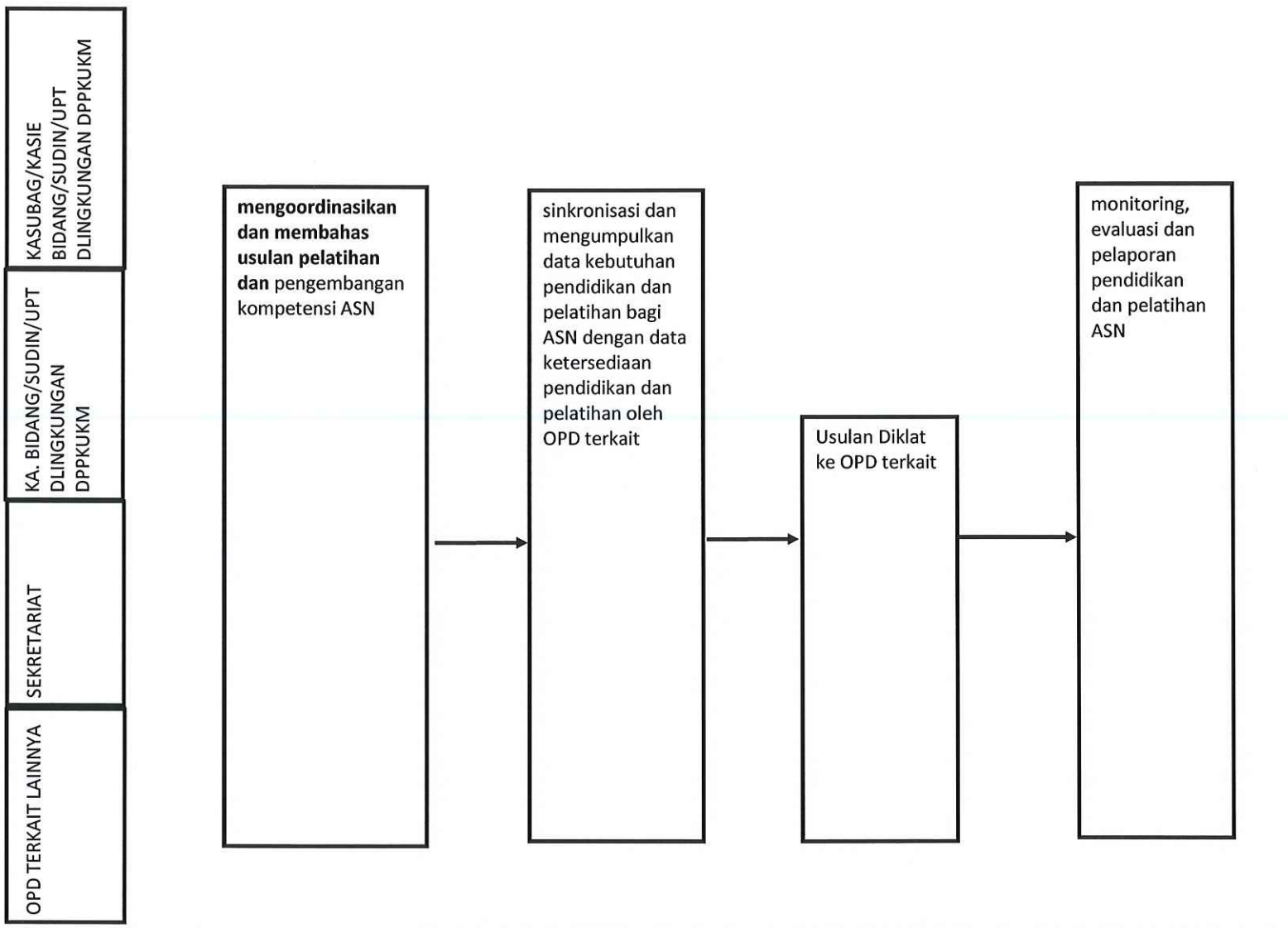
DKI-01.02 CFM.1 ANALISIS KERJA DAN JABATAN

PETA LINTAS FUNGSI (CROSS-FUNCTIONAL MAP/CFM)



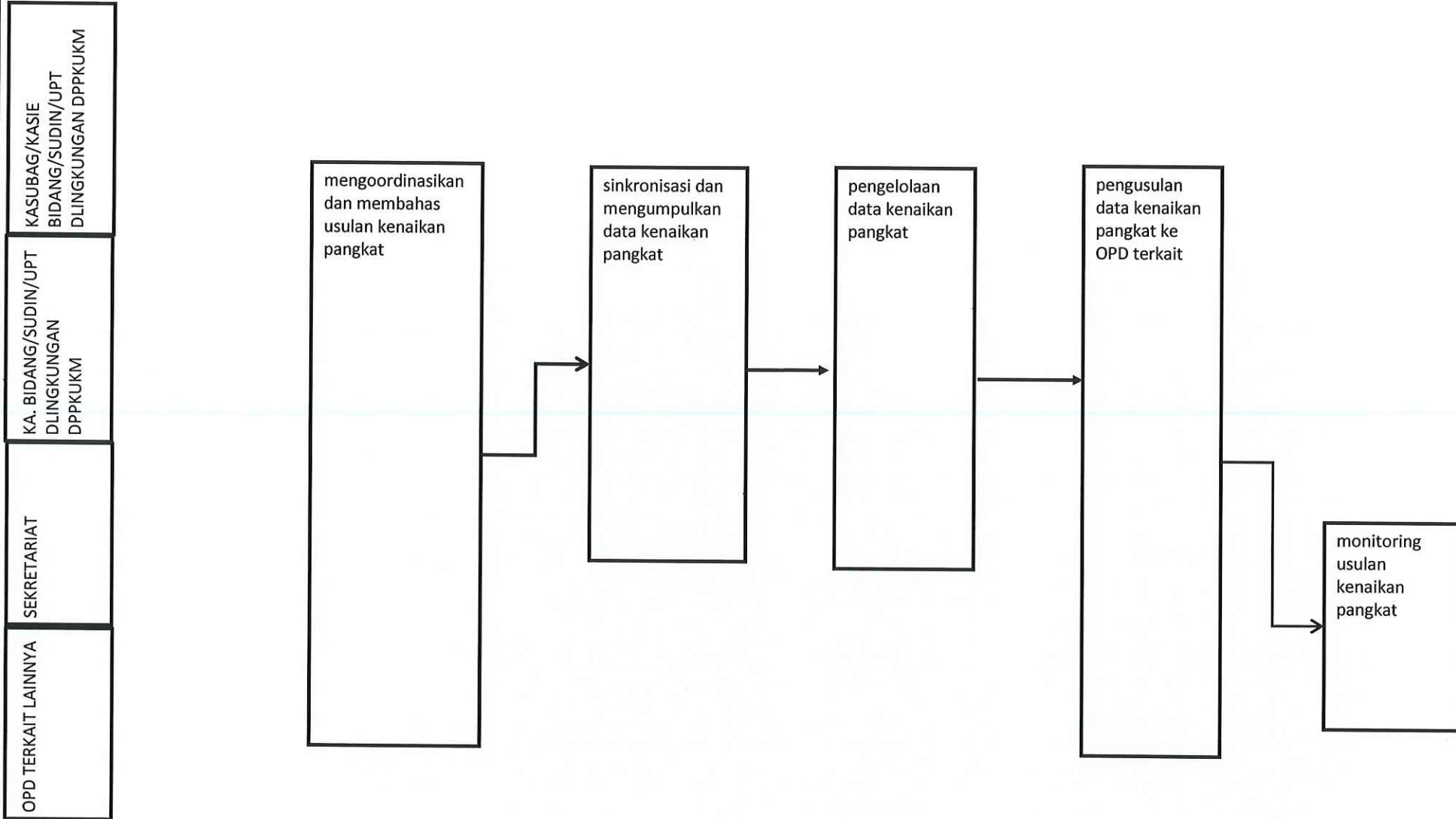
DKI-01.02 CFM.2 PENGELOLAAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

PETA LINTAS FUNGSI (CROSS-FUNCTIONAL MAP/CFM)



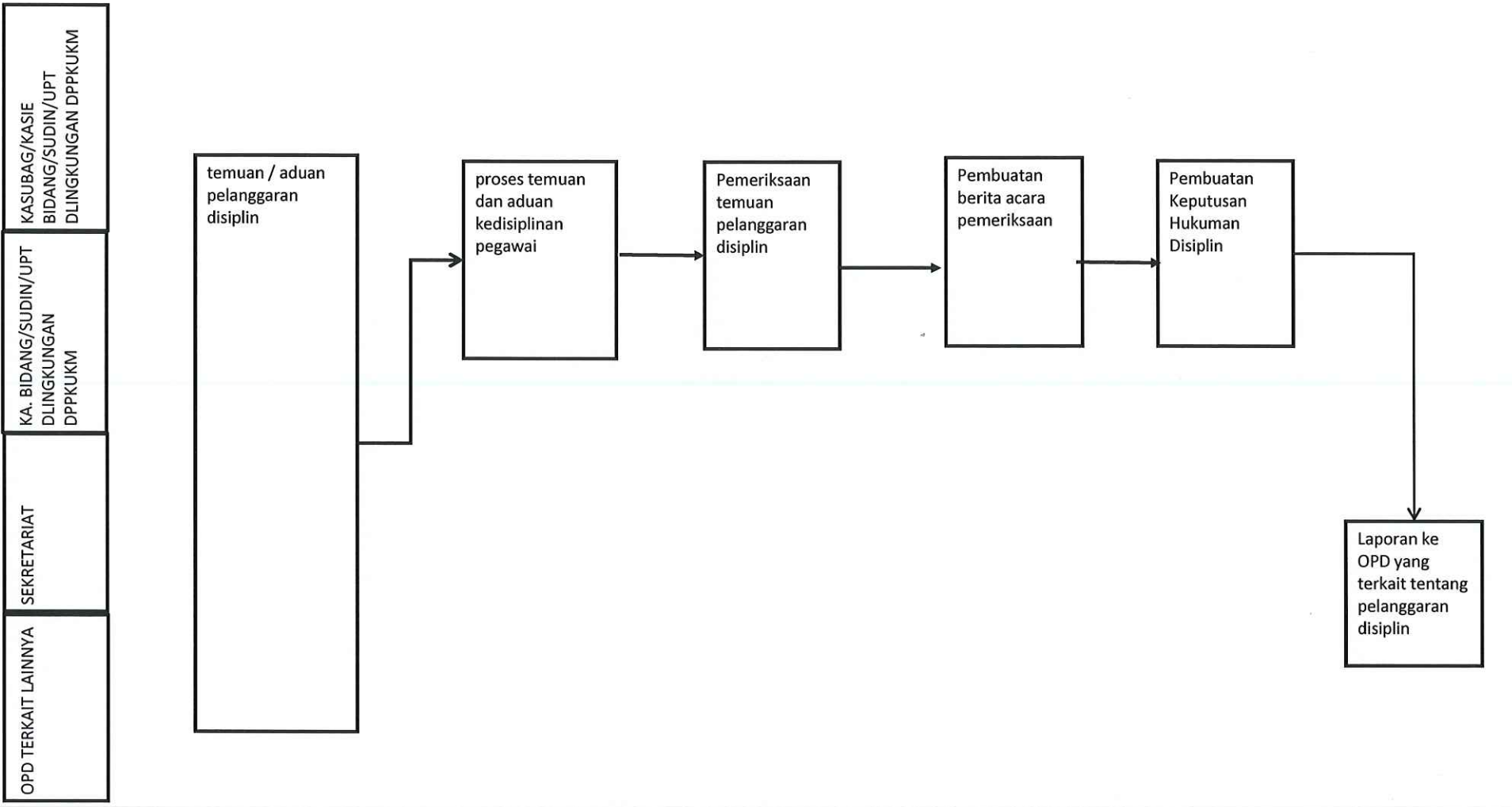
DKI-01.02 CFM.3 PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT

PETA LINTAS FUNGSI (CROSS-FUNCTIONAL MAP/CFM)



DKI-01.02 CFM.4 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SDM

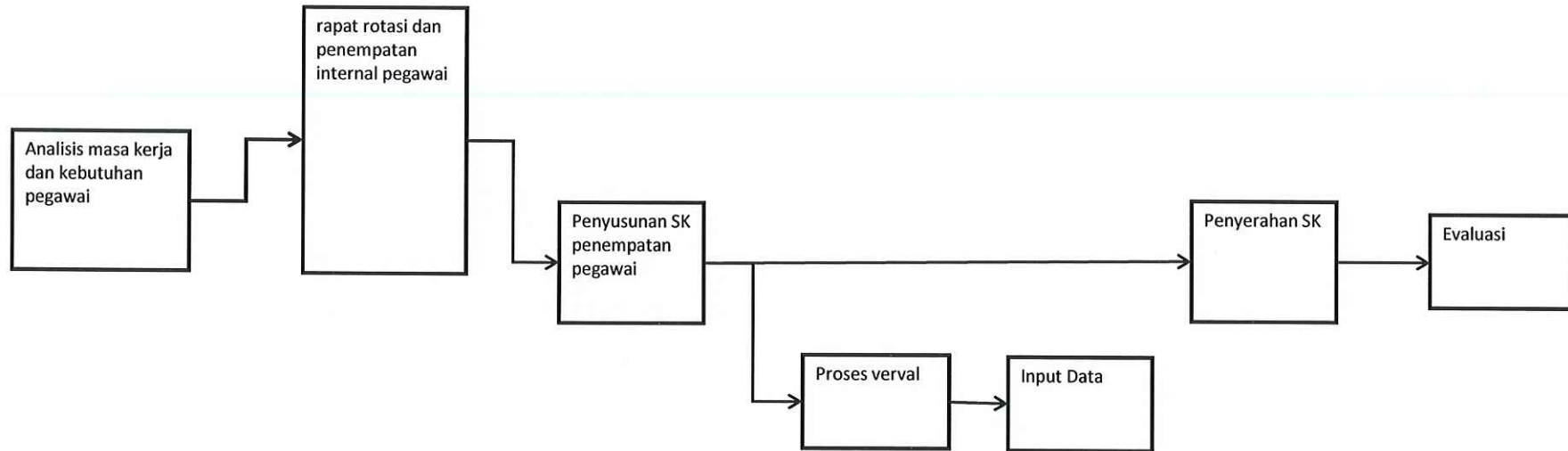
PETA LINTAS FUNGSI (CROSS-FUNCTIONAL MAP/CFM)



DKI-01.02 CFM.4 ROTASI DAN PENEMPATAN INTERNAL PEGAWAI

PETA LINTAS FUNGSI (CROSS-FUNCTIONAL MAP/CFM)

OPD TERKAIT LAINNYA
SEKRETARIAT
KA. BIDANG/SUDIN/UPT DLINGKUNGAN DPPKUKM
KASUBAG/KASIE BIDANG/SUDIN/UPT DLINGKUNGAN DPPKUKM



PPKUKM-01.03 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA OPD

PETA LINTAS FUNGSI

P
E
N
D
U
K
U
N
G

PPKUKM-01.03 CFM.1
PENGHAPUSAN DAN
PELAPORAN BARANG
PERSEDIAAN

PPKUKM-01.03 CFM.2
PENDISTRIBUSIAN BARANG
PERSEDIAAN

PPKUKM-01.03 CFM.3
PENDISTRIBUSIAN BARANG ATK

SUPPLIER

- KEMENTERIAN/LEMBAGA
- DPRD
- AKADEMISI
- PRAKTISI
- ORMAS
- ASOSIASI
- BUMD
- MASYARAKAT
- PD/UKPD

INPUT

- KEBIJAKAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA OPD
- DOKUMEN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA OPD LAINNYA

OUTPUT

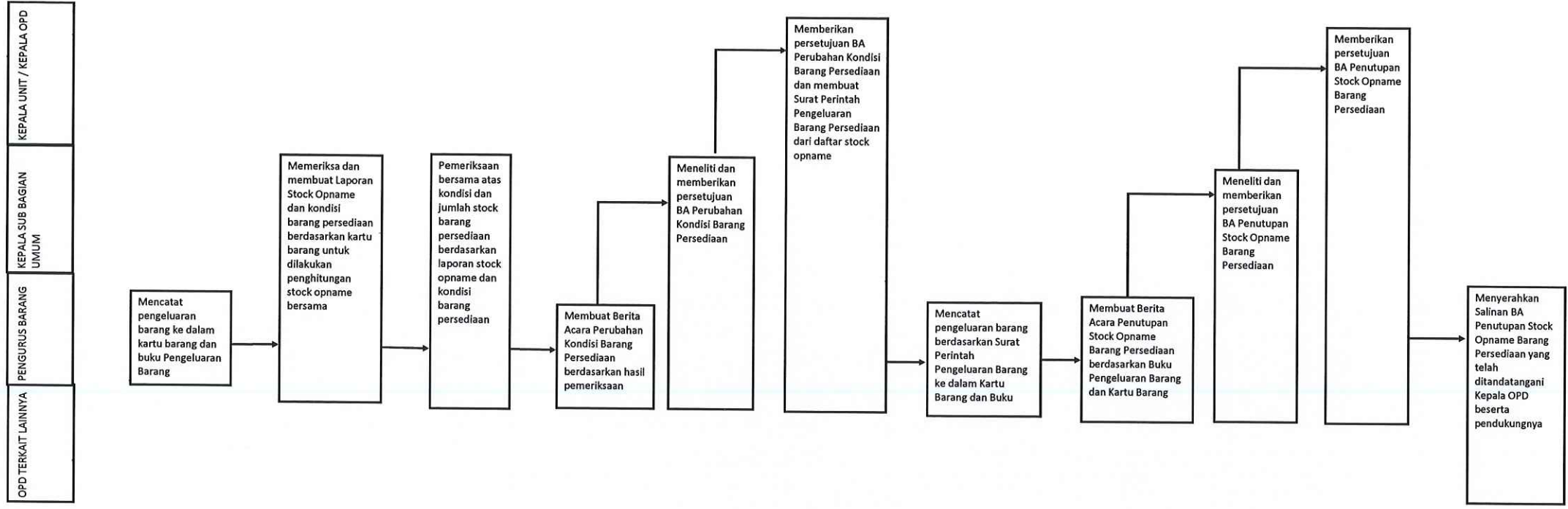
- HASIL PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA OPD
- DOKUMEN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA OPD

CUSTOMER

- KEMENTERIAN/LEMBAGA
- DPRD
- AKADEMISI
- ORMAS
- ASOSIASI
- BUMD
- MASYARAKAT
- PD/UKPD
- PRAKTISI

PPKUM-01.03 CFM.1 PENGHAPUSAN DAN PELAPORAN BARANG PERSEDIAAN

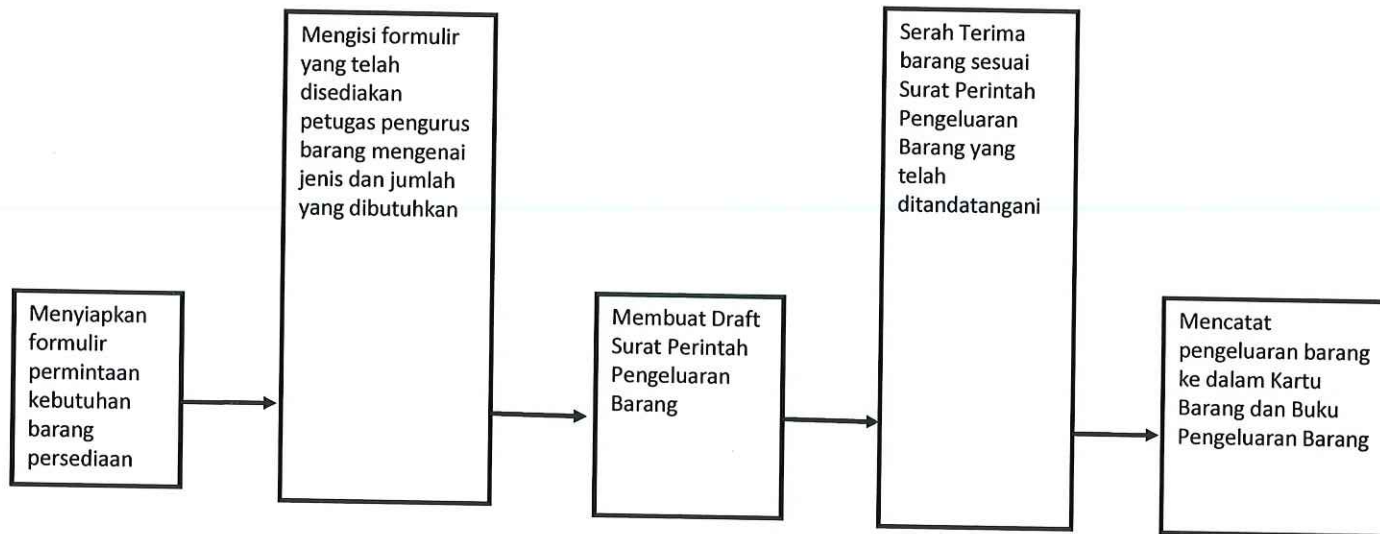
PETA LINTAS FUNGSI (CROSS-FUNCTIONAL MAP/CFM)



PPKUKM-01.03 CFM.2 PENDISTRIBUSIAN BARANG PERSEDIAAN

PETA LINTAS FUNGSI (CROSS-FUNCTIONAL MAP/CFM)

KEPALA UNIT / KEPALA OPD
KA. BIDANG DI LINGKUNGAN DPPKUKM
PENGURUS BARANG
OPD TERKAIT LAINNYA



PPKUKM-01.03 CFM.3 PENDISTRIBUSIAN BARANG PERSEDIAAN ATK

PETA LINTAS FUNGSI (CROSS-FUNCTIONAL MAP/CFM)

